



**PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI DENGAN RISIKO LITIGASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Universitas Negeri Semarang**

UNNES
Oleh
Tata Nabela
NIM 7211414173
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Agustus 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Fachrurrozie, M.Si.
NIP. 196206231989011001

Pembimbing



Drs. Asrori, MS.
NIP. 196005051986011001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

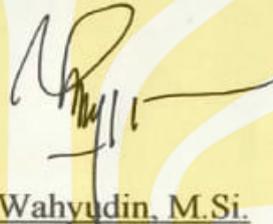
PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

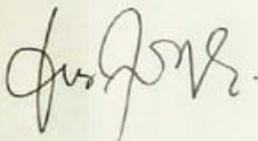
Tanggal : 10 September 2018

Penguji I



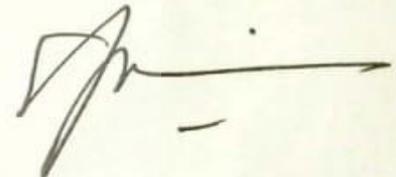
Dr. Agus Wahyudin, M.Si.
NIP. 196208121987021001

Penguji II



Linda Agustina, S.E., M.Si.
NIP. 197708152000122001

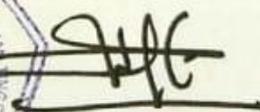
Penguji III



Drs. Asrori, MS.
NIP. 196005051986011001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto, MBA, Ph.D.
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tata Nabela

NIM : 7211414173

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 17 Juli 1994

Alamat : Margoyoso RT 01 RW 01 Margoyoso Pati

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar – benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, 15 Agustus 2018

Penulis



Tata Nabela
NIM 7211414173

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi.” (Buya Hamka)

”Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 216)

Persembahan

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

1. Ibuku Fatimatuz Zuhriyah, Bapakku Arwani, Kakakku Ahmad Feriq Bina Haqqi serta Adikku Afwah Nafyan Dauliy dan Ahdimas Husnun Khotami tercinta yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, dukungan dan motivasi.
2. Sahabat dan teman seperjuangan yang telah memberikan nasihat dan motivasi.
3. Bapak Drs. Asrori, MS dan seluruh dosen yang telah membimbing saya selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
4. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Tingkat Hutang Terhadap Konservatisme Akuntansi dengan Risiko Litigasi Sebagai Variabel Moderating”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir Program Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini memperoleh bimbingan, bantuan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi.
4. Dr. Agus Wahyudin, M.Si., penguji I yang telah memberikan saran serta masukan terhadap skripsi ini.

5. Linda Agustina, S.E., M.Si., penguji II yang telah memberikan saran serta masukan terhadap skripsi ini.
6. Drs. Asrori, MS., Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan memberikan sumbangan pemikiran selama penulisan hingga selesainya skripsi ini.
7. Drs. Subowo, M.Si., Dosen Wali Jurusan Akuntansi Rombel D 2014, yang telah memberikan arahan dan nasihat selama menjalani perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan,
9. Seluruh teman-temanku terkhusus Akuntansi D 2014, teman seperjuangan bimbingan, teman kos ekasari, Rizky Satya Putra, Siti Fatimah, Aprilia Rahayu, Ngestia Nor Istianah, Kartika Putri, Laeli Dhikriyah, yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Selain itu penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, serta dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Semarang, 15 Agustus 2018
Penulis,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tata Nabela
NIM 7211414173

SARI

Nabela, Tata. 2018: “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Tingkat Hutang Terhadap Konservatisme Akuntansi dengan Risiko Litigasi sebagai Variabel Moderating”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Asrori, MS. hal. 127

Kata Kunci: Konservatisme Akuntansi, Pengungkapan CSR, Tingkat Hutang, Risiko Litigasi.

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan harus memenuhi tujuan, aturan serta prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku umum agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi setiap penggunanya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan informasi keuangan yang berkualitas dan bermanfaat untuk para penggunanya. Dalam penyajian laporan keuangan agar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat maka perusahaan dihadapkan pada keterbatasan (*constraint*) yang salah satunya adalah konservatisme. Beberapa skandal keuangan di Indonesia secara tidak langsung mengindikasikan rendahnya tingkat konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan dalam mempersiapkan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dan tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi dengan risiko litigasi sebagai variabel moderating.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016 yaitu sebanyak 41 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan target populasi pada perusahaan pertambangan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan terpilih 81 unit analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial meliputi uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dan tingkat hutang berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi dengan nilai signifikansi berturut-turut 0,000 dan 0,002. Risiko litigasi memoderasi secara signifikan pengaruh pengungkapan CSR dan tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi dengan nilai signifikansi berturut-turut 0,014 dan 0,001.

Simpulan dari penelitian ini adalah pengungkapan CSR dan tingkat hutang berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi, risiko litigasi memoderasi secara signifikan pengaruh pengungkapan CSR dan tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi. Saran untuk perusahaan pertambangan agar mengungkapkan CSR lebih menyeluruh dan meningkatkan penerapan akuntansi yang konservatif. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan *market to book ratio* untuk mengukur konservatisme akuntansi, penggunaan teori lain untuk memandang pengaruh pengungkapan CSR terhadap konservatisme akuntansi dan menggunakan sampel selain perusahaan pertambangan.

ABSTRACT

Nabela, Tata. 2018. "The Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure and Debt Levels on Accounting Conservatism with Litigation Risk as Moderating Variable". Final Project. Accounting Department. Economic Faculty. Semarang State University. Advisor: Drs. Asrori, MS, page. 127

Keywords: Accounting Conservatism, CSR Disclosure, Debt Levels, Litigation Risk.

Financial statements made by the company should meet the objectives, rules and accounting principles in accordance with the generally accepted standards in order to generate financial reports that can be accounted for and useful to its users. Therefore it is desperately needed a qualified financial information and useful for its users. In the presentation of the financial statements in order to produce a qualified and useful information, the company is exposed its limitations (constraint), one of them is conservatism. Some financial scandal in Indonesia indirectly indicate low levels of conservatism that is applied by the company in preparing the financial statements. This research aims to examine the influence of corporate social responsibility disclosure and debt level on accounting conservatism with litigation risk as moderating variable.

The population in this research is the mining company listed in Indonesia stock exchange during the years 2014-2016 as many as 41 companies. Sampling method uses the target population in selected mining companies based on certain criteria and selected 81 units of analysis. Data collection technique uses study documentation and data analysis techniques use descriptive analysis and inferensial analysis include classical assumption and multiple regression analysis.

The results showed that CSR disclosure and debt levels have a positive significant effect toward accounting conservatism at the value of 0,000 and 0,002. The risk of litigation significantly moderate the influence of CSR disclosure and debt levels toward accounting conservatism at the value significance of 0,014 and 0,001.

Conclusions of the research show that CSR disclosure and debt levels have a positive significant effect toward accounting conservatism, the risk of litigation significantly moderate the influence of CSR disclosure and debt levels toward accounting conservatism. Suggestions for mining companies in order to disclose more comprehensive in CSR and enhance the application of accounting conservatism. As for further research is to use the market to book ratio to measure the use of accounting conservatism, another theory to look at the influence of the CSR disclosure toward accounting conservatism and use another sample besides mining companies.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	14
1.3 Cakupan Masalah	15
1.4 Rumusan Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian.....	16
1.6 Kegunaan Penelitian.....	17
1.7 Orisinalitas Penelitian	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN	19
2.1 Kajian Teori Utama.....	19

2.1.1 Teori Legitimasi (<i>Legitimacy Theory</i>).....	19
2.1.2 Teori Akuntansi Positif (<i>Positive Accounting Theory</i>).....	23
2.1.3 Teori Stakeholder (<i>Stakeholder Theory</i>)	26
2.2 Kajian Variabel Penelitian	32
2.2.1 Konservatisme Akuntansi.....	32
2.2.1.1 Manfaat Konservatisme Akuntansi	35
2.2.1.2 Jenis Konservatisme Akuntansi.....	37
2.2.1.3 Konservatisme Akuntansi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).....	38
2.2.1.4 Pengukuran Konservatisme Akuntansi.....	40
2.2.2 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)	43
2.2.3 Tingkat Hutang	47
2.2.4 Risiko Litigasi.....	50
2.3 Kajian Penelitian Terdahulu.....	54
2.4 Kerangka Berpikir	63
2.4.1 Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap Konservatisme Akuntansi	63
2.4.2 Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Konservatisme Akuntansi	66
2.4.3 Risiko Litigasi Memoderasi Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Konservatisme Akuntansi	68
2.4.4 Risiko Litigasi Memoderasi Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Konservatisme Akuntansi	71

2.5 Hipotesis Penelitian.....	75
BAB III METODE PENELITIAN.....	76
3.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	76
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	76
3.2.1 Populasi Penelitian.....	76
3.2.2 Sampel Penelitian.....	77
3.3 Variabel Penelitian.....	78
3.3.1 Konservatisme Akuntansi.....	78
3.3.2 Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	81
3.3.3 Tingkat Hutang.....	82
3.3.4 Risiko Litigasi.....	83
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	85
3.5 Teknik Analisis Data.....	86
3.5.1. Teknik Analisis Deskriptif.....	86
3.5.2. Teknik Analisis Inferensial.....	87
3.5.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	87
a. Uji Normalitas.....	87
b. Uji Multikolinearitas.....	88
c. Uji Autokorelasi.....	89
d. Uji Heterokedastisitas.....	90
3.5.2.2 Uji Hipotesis.....	92
a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	93
b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	94

4.2.2 Pengaruh Tingkat Hutang Terhadap Konservatisme Akuntansi	119
4.2.3 Risiko Litigasi Memoderasi Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Konservatisme Akuntansi	122
4.2.4 Risiko Litigasi Memoderasi Pengaruh Tingkat Hutang Terhadap Konservatisme Akuntansi	124
BAB V PENUTUP	128
5.1 Simpulan	128
5.2 Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	136

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	56
Tabel 3. 1 Kriteria Sampel Penelitian	77
Tabel 3. 2 Rangkuman Variabel Penelitian	84
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Konservatisme Akuntansi	97
Tabel 4. 2 Deskripsi Variabel Konservatisme Akuntansi	98
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)	99
Tabel 4. 4 Deskripsi Variabel Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)	100
Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif Tingkat Hutang	101
Tabel 4. 6 Deskripsi Variabel Tingkat Hutang	102
Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif Risiko Litigasi	103
Tabel 4. 8 Deskripsi Variabel Risiko Litigasi	104
Tabel 4. 9 Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov	105
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas	106
Tabel 4. 11 Hasil Uji Autokorelasi	107
Tabel 4. 12 Hasil Uji Heterokedastisitas	108
Tabel 4. 13 Hasil Uji Signifikansi Simultan	109
Tabel 4. 14 Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji t)	110
Tabel 4. 15 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	114
Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Model Penelitian 74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Populasi

Lampiran 2 Proses Pengambilan Sampel

Lampiran 3 Rangkuman Variabel Penelitian

Lampiran 4 Indikator Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Lampiran 5 Hasil Tabulasi Data Penelitian

Lampiran 6 Hasil Statistik Deskriptif

Lampiran 7 Hasil Analisis Kelas Interval

Lampiran 8 Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Lampiran 10 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan harus memenuhi tujuan, aturan serta prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku umum agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi setiap penggunanya (Yuliarti & Yanto, 2017). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk memilih metode maupun estimasi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan (Risdiyani & Kusmuriyanto, 2015). Kebebasan manajemen dalam memilih metode akuntansi ini akan mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan (Wardhani, 2008). Manajer dapat melakukan pelaporan keuangan yang optimis maupun konservatif, akan tetapi pelaporan yang optimis terkadang dapat menyesatkan dan merugikan penggunanya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan informasi keuangan yang berkualitas dan bermanfaat untuk para penggunanya. Dalam penyajian laporan keuangan agar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat maka perusahaan dihadapkan pada keterbatasan (*constraint*) yang salah satunya adalah konservatisme.

Basu (1997) menafsirkan konservatisme akuntansi sebagai kecenderungan atau tendensi akuntan untuk menuntut tingkat verifikasi yang lebih tinggi dalam mengakui laba (*good news*) dibandingkan dengan mengakui rugi (*bad news*) dalam laporan keuangan. Watts (2003) mendefinisikan konservatisme akuntansi sebagai

prinsip yang tidak mengantisipasi keuntungan, tetapi mengantisipasi kerugian. Sementara menurut Suwardjono (2017) konservatisme adalah tindakan kehati-hatian dalam pembuatan laporan keuangan diimplikasikan dengan mengakui biaya atau rugi yang mungkin akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar. Konservatisme akuntansi merupakan prinsip penting yang telah lama mempengaruhi pelaporan keuangan. Konservatisme menjadi pertimbangan dalam akuntansi dan laporan keuangan karena aktivitas perusahaan dilingkupi oleh ketidakpastian (Deslatu & Susanto, 2009). Dalam hal ini apabila terdapat kondisi yang memiliki kemungkinan menimbulkan kerugian, biaya atau hutang, maka kerugian, biaya atau hutang tersebut harus segera diakui. Sebaliknya, apabila terdapat kondisi yang kemungkinan menghasilkan laba, pendapatan, atau aset, maka laba, pendapatan atau aset tersebut tidak boleh langsung diakui, sampai kondisi tersebut betul-betul telah terealisasi.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan, terdapat beberapa metode akuntansi yang menerapkan prinsip konservatisme. Misalnya PSAK No. 14 mengenai persediaan dan pilihan dalam menghitung biaya persediaan, PSAK No. 16 mengenai aset tetap dan pilihan dalam menghitung biaya penyusutannya, PSAK No. 19 mengenai aset tidak berwujud dan pilihan dalam menghitung amortisasinya dan PSAK No. 20 mengenai biaya riset dan pengembangan (Reskino & Vemiliyarni, 2014). Konsep konservatisme akan menghasilkan laporan keuangan yang bersifat pesimis karena dengan menggunakan konsep konservatisme akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang *understatement*. Namun

ketika perusahaan menggunakan prinsip optimis atau kurang konservatif, maka akan menimbulkan *overstatement* dalam laporan keuangannya sehingga banyak para kreditur yang lebih mengharapkan penggunaan konsep konservatisme dalam pembuatan laporan keuangan, karena *overstatement* yang dihasilkan dari sikap optimis pembuat laporan keuangan akan lebih berbahaya daripada *understatement* yang dihasilkan dari sikap pesimis (Padmawati & Fachrurrozie, 2015). Penerapan akuntansi konservatif juga dapat memungkinkan kreditur untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang sebenarnya karena perusahaan mengakui beban atau rugi dengan segera daripada mengakui laba atau pendapatan.

Konsep konservatisme akuntansi dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan yang digunakan dalam kaitannya dengan kontrak hutang serta dapat mengurangi asimetri informasi (LaFond & Watts, 2008; Watts, 2003). Namun konsep konservatisme masih menjadi *pro* dan *kontra* sehingga diperlukan telaah lebih lanjut mengenai konsep tersebut. Belkaoui (2000:187) menjelaskan bahwa konservatisme digunakan bila berhubungan dengan ketidakpastian dalam lingkungan dan kemungkinan optimisme berlebihan dari manajer atau pemilik dan juga ketika melindungi kreditur dari distribusi aset perusahaan sebagai dividen yang tak beralasan. Konservatisme merupakan manifestasi intervensi akuntan yang mungkin dapat menghasilkan bias, kesalahan, kemungkinan distorsi dan laporan yang menyesatkan, oleh karena itu pandangan sekarang terhadap konservatisme sebagai prinsip akuntansi harus dihilangkan. Sedangkan Harahap (2012:90) menyatakan

bahwa apabila dihadapkan untuk memilih diantara dua atau lebih prinsip atau teknik akuntansi yang sama-sama diterima, kita harus mengutamakan pilihan yang memberikan pengaruh keuntungan paling kecil pada ekuitas pemilik. Lebih khusus lagi kita harus memiliki nilai yang paling rendah untuk melaporkan pos aktiva dan laba, serta nilai yang paling tinggi untuk melaporkan pos kewajiban dan biaya yang harus dibayar. Prinsip konservatisme menggambarkan bahwa akuntansi menganut sikap pesimis sewaktu memilih prinsip akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan. Sebelumnya prinsip konservatisme ini digunakan untuk hal atau lingkungan yang sifatnya tidak menentu dan untuk menghadapi kemungkinan manajer atau pemilik terlalu optimis dengan maksud untuk melindungi kreditur dari pembagian kekayaan perusahaan dalam bentuk dividen. Namun, sekarang ini konsep tersebut semakin berkurang peranannya karena menonjolkan penyajian yang *fair* dan *reliable*. Konsep ini masih perlu terutama dalam menaksir taksiran umur *asset*, nilai residu, dan penilaian persediaan dan surat-surat berharga.

Beberapa skandal keuangan di Indonesia secara tidak langsung mengindikasikan rendahnya tingkat konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan dalam mempersiapkan laporan keuangan (Yuliarti & Yanto, 2017) terutama kasus penggelembungan laba. Sebagai contoh adalah kasus rekayasa pelaporan penjualan yang diduga dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk dan anak usaha sejak tahun 2003-2008 sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 620,49 juta. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dengan menggunakan berbagai data primer termasuk laporan keuangan yang telah diaudit menunjukkan laporan penjualan BUMI selama 2003-2008 lebih rendah US\$ 1,06 miliar dari yang

sebenarnya. Akibatnya, selama itu pula diperkirakan kerugian negara dari kekurangan penerimaan Dana Hasil Produksi Batubara (royalti) sebesar US\$ 143,18 juta (bisnis.tempo.co, 2010). Di luar perusahaan pertambangan, terdapat kasus *mark-up* laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Kimia Farma dan PT Kereta Api Indonesia.

Seperti dilansir di situs berita *online* bisnis.tempo.co (2003), Kepala Biro Hukum Bapepam menjelaskan bahwa PT Kimia Farma melakukan *mark-up* laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001 sebesar Rp 132 miliar, yang sebenarnya hanya meraih laba sebesar Rp 99 miliar. Sedangkan pada PT KAI, pada tahun 2005 telah terjadi *overstatement* dalam pelaporan keuangannya, PT KAI seharusnya merugi Rp 63 miliar namun dicatat laba Rp 6,9 miliar. Kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan laporan keuangan *overstatement* diantaranya adalah (1) Piutang PPN senilai Rp. 95,2 miliar seharusnya dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena telah diragukan kolektibilitasnya, (2) Persediaan suku cadang Rp. 1,4 miliar yang dialihkan belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, yang seharusnya telah menjadi beban tahun 2005, (3) Beban Gaji bulan Desember 2005 akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2006 namun telah dibayar uang muka sebesar Rp. 28 miliar pada periode 31 Desember 2005, dicatat sebagai uang muka biaya gaji, yang seharusnya dicatat sebagai beban gaji pada tahun 2005 (bisnis.tempo.co, 2006).

Selain kasus pada PT Bumi Resources Tbk, PT Kimia Farma dan PT Kereta Api Indonesia, ada pula kasus kecurangan yang dilakukan oleh PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang terindikasi melakukan salah saji dalam laporan keuangannya.

Dalam keterbukaan informasi INVS bertanggal 25 Februari 2015, ada delapan item dalam laporan keuangan INVS yang harus diperbaiki. Pada periode semester pertama 2014 pembayaran gaji pada karyawan Rp 1,9 triliun. Namun, pada kuartal ketiga 2014 angka pembayaran gaji pada karyawan turun menjadi Rp 59 miliar. Sebelumnya, manajemen INVS telah merevisi laporan keuangannya untuk periode Januari hingga September 2014. Dalam revisinya tersebut, beberapa nilai pada laporan keuangan mengalami perubahan nilai, salah satu contohnya adalah penurunan nilai aset tetap menjadi Rp 1,16 triliun setelah revisi dari sebelumnya diakui sebesar Rp 1,45 triliun. Inovisi juga mengakui laba bersih per saham berdasarkan laba periode berjalan yang menjadikan laba bersih per saham INVS tampak lebih besar, yang mana seharusnya INVS menggunakan laba periode berjalan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk (www.bareksa.com, 2015). Adanya kasus penggelembungan laba mengindikasikan laporan keuangan tidak disajikan sesuai tujuan operasional dan tidak dapat dipercaya dalam membuat keputusan ekonomi. Menurut Brilianti (2013) kasus yang terjadi pada PT Bumi Resources Tbk, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia dan PT Inovisi Infracom Tbk menunjukkan perlunya informasi keuangan yang berkualitas dan bermanfaat untuk para penggunanya dalam mengolah akuntansi agar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas salah satunya adalah dengan menerapkan konservatisme.

Teori legitimasi berasal dari konsep legitimasi organisasi yang diungkapkan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) yang didefinisikan sebagai suatu kondisi atau status dimana organisasi atau entitas berusaha untuk membangun kesesuaian antara

nilai-nilai sosial yang terkait dengan kegiatan mereka dan norma-norma perilaku yang dapat diterima dalam sistem nilai masyarakat yang lebih luas di tempat organisasi atau entitas tersebut berada. Teori legitimasi mencakup gagasan tentang kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat (Jupe, 2005). Ghozali dan Chariri (2014:442) berpendapat bahwa teori legitimasi ini berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam hal ini perusahaan berusaha untuk memenuhi harapan masyarakat dan memposisikan diri sebaik mungkin di tengah masyarakat yang semakin maju agar dapat mempertahankan legitimasinya. Perusahaan dapat memperoleh legitimasi apabila nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Ketika terdapat perbedaan antara dua sistem nilai tersebut akan memicu ancaman legitimasi bagi organisasi. Ancaman ini dapat berupa sanksi sosial, hukum, ekonomi dan lainnya (Dowling & Pfeffer, 1975).

Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa (Ghozali & Chariri, 2014:69). Menurut Watts dan Zimmerman (1990) dalam Ghozali dan Chariri (2014:70), teori akuntansi positif berusaha menguji tiga hipotesis yaitu hipotesis rencana bonus (*plan bonus hypothesis*), hipotesis hutang/ekuitas (*debt/equity hypothesis*) dan hipotesis kos politik (*political cost hypothesis*). Teori akuntansi positif dalam penelitian ini dikembangkan dengan maksud menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi antar perusahaan yang difokuskan pada dua alasan. Alasan pertama adalah alasan oportunistik yang digunakan perusahaan dalam memilih metode akuntansi tertentu. Alasan

oportunistik ini sering disebut *ex-post* yaitu pemilihan metode akuntansi dilakukan sesudah diketahui adanya fakta. Alasan kedua adalah alasan efisiensi berkaitan dengan metode akuntansi yang dipilih guna mengurangi biaya kontrak antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Alasan efisiensi disebut dengan *ex-ante* karena pemilihan metode akuntansi dilakukan sebelum fakta diketahui.

Teori *stakeholder* membawa pandangan bahwa perusahaan menginvestasikan sumber daya untuk memenuhi harapan *stakeholder* dalam rangka untuk memperoleh dukungan mereka atau untuk menghindari menarik perhatian yang tidak diinginkan dari kelompok-kelompok eksternal (Cheng & Kung, 2016). *Stakeholder* disini meliputi investor, kreditur, masyarakat, pemerintah, pelanggan, karyawan, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Freeman (1984) dalam Lindawati dan Puspita (2015) menyatakan bahwa istilah *stakeholder* diperkenalkan pertama kali oleh *Standford Research Institute* (SRI) di tahun 1963 dan mendefinisikan *stakeholder* sebagai sebuah organisasi, grup atau individu yang dapat dipengaruhi dan memengaruhi tujuan organisasi tersebut. Perusahaan hendaknya tidak hanya terfokus untuk memakmurkan pemegang saham saja, tetapi juga pihak lain yang harus memiliki hak yang sama untuk menerima manfaat dari keberadaan perusahaan itu sendiri (Lin & Amin, 2016). Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan (Gozhali & Chariri, 2014:439). Eksistensi perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga kegiatan perusahaan disesuaikan dengan harapan *stakeholder* untuk mendapatkan

dukungan itu. Semakin kuat *stakeholder*, semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi (Gray, *et al.* 1995).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dan tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi, dengan merujuk pada teori legitimasi, teori akuntansi positif dan teori *stakeholder*. Dalam konsep *sustainability development*, keberlanjutan suatu perusahaan bergantung pada seberapa besar perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab finansial. Tanggung jawab kemudian dikomunikasikan oleh perusahaan kepada *stakeholder* melalui pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Lindawati & Puspita, 2015). Manajer di perusahaan dengan reputasi yang lebih baik dalam pemenuhan tanggung jawab sosial cenderung menunjukkan kedisiplinannya untuk menyediakan informasi laba yang berkualitas. Perusahaan berusaha menggunakan pengungkapan CSR sebagai alat untuk mengubah pandangan para pemangku kepentingan, dengan demikian dapat meningkatkan citra perusahaan dan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat dan meningkatkan reputasi. Selanjutnya perusahaan yang telah memenuhi tanggung jawab sosial dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, sehingga perusahaan melarang manajemen terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan harapan pemangku kepentingan (Cheng & Kung, 2016).

Fombrun, *et al.* (2000) menyatakan bahwa motivasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial terletak pada keinginan untuk mendapat pengakuan

(legitimasi) dan dukungan dari *stakeholder* serta mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Secara tidak langsung, pelaporan informasi laba yang berkualitas tinggi merupakan sebuah tanggung jawab sosial, yang dapat mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Konservatisme dalam akuntansi dianggap sebagai indikator penting terhadap kualitas laporan keuangan (Basu, 1997), sehingga penerapan akuntansi yang konservatif berarti perusahaan telah berupaya untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak yang bekepentingan dengan menyediakan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan demikian perusahaan dapat mempertahankan legitimasinya.

Penelitian tentang konservatisme akuntansi dengan menggunakan pengungkapan CSR sebagai variabel penjelas tergolong penelitian baru di Indonesia. Penelitian mengenai pengaruh *corporate social responsibility* terhadap konservatisme akuntansi pertama kali dilakukan oleh Cheng dan Kung (2016) dengan hasil yang positif signifikan pada perusahaan BUMN di China. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pengungkapan CSR terhadap konservatisme akuntansi dengan obyek perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia, mengingat perusahaan pertambangan menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan berkaitan dengan sumber daya alam.

Tingkat hutang atau *leverage* menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang dan merupakan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Risdiyani & Kusmuriyanto, 2015). Perusahaan yang mempunyai tingkat hutang relatif tinggi, kreditur mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan operasi dan akuntansi perusahaan (Yuliarti & Yanto,

2017). Teori akuntansi positif menurut Watts dan Zimmerman (1990) pada hipotesis hutang atau ekuitas menyatakan bahwa makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Hal ini disebabkan karena makin tinggi rasio hutang atau ekuitas, makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat hutang, maka kreditur menuntut penerapan akuntansi yang konservatif untuk melindunginya dari risiko yang merugikan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Yuliarti dan Yanto (2017), Pratanda dan Kusmuriyanto (2014), Alfian dan Sabeni (2013), serta Hertina dan Zulaikha (2017) dimana hasil penelitian mereka menyatakan bahwa tingkat hutang (*leverage*) berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Namun pada penelitian Oktomegah (2012), Aristiyani dan Wirawati (2013) serta Noviantari dan Ratnadi (2015) menunjukkan hasil yang negatif signifikan. Sementara Brilianti (2013), Purnama dan Daljono (2013), Mulyani dan Juvenrio (2017) gagal membuktikan tingkat hutang berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian mengenai pengaruh tingkat hutang dan konservatisme akuntansi perlu dilakukan kembali karena terjadi *research gap* pada penelitian sebelumnya.

Perusahaan yang melaksanakan kewajiban CSRnya, akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berhubungan baik dengan masyarakat dan mengubah budaya perusahaan (Cheng & Kung, 2016) serta menumbuhkan perilaku moral

manajemen yang baik untuk senantiasa memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Pengungkapan CSR merupakan kebiasaan moral yang dapat menghambat kecenderungan manipulasi laba dengan berusaha memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan sukarela menyediakan informasi keuangan yang transparan dan dapat diandalkan serta laporan keuangan yang berkualitas. Salah satunya adalah dengan menyediakan laporan keuangan yang konservatif dimana konservatisme akuntansi memberikan batasan bagi manajer agar segera mengakui rugi atau beban tahun berjalan dibandingkan dengan mengakui laba atau pendapatan yang belum tentu terealisasi. Oleh karena itu perusahaan cenderung menyediakan laporan keuangan yang konservatif untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* dan juga mengurangi biaya litigasi. Terkait dengan pengaruh pengungkapan CSR terhadap konservatisme akuntansi, ada hal lain yang mempengaruhi yaitu risiko litigasi. Dengan adanya risiko tuntutan hukum (litigasi) akan mendorong perkembangan konservatisme karena tuntutan hukum banyak muncul saat laba dan aktiva dicatat terlalu tinggi dimana hal tersebut dapat merugikan investor dan kreditur sebagai *stakeholder*. Karena adanya potensi tuntutan hukum akibat pencatatan yang *overstatement* daripada yang *understatement*, manajemen dan auditor terdorong untuk melaporkan laba dan aktiva yang konservatif (Sari, 2004). Perusahaan yang mengalami tuntutan hukum akan kehilangan kepercayaan dari *stakeholder* dan dapat merusak reputasi perusahaan serta mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Maka dari itu dengan adanya risiko litigasi ini perusahaan yang mengungkapkan CSR sesuai dengan aturan yang berlaku akan cenderung lebih konservatif.

Risiko litigasi dapat timbul dari pihak kreditur maupun investor. Risiko litigasi yang berasal dari kreditur disebabkan oleh risiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutangnya (Suryandari & Priyanto, 2012). Semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka semakin dekat perusahaan pada batas yang dipersyaratkan dalam kontrak hutang. Semakin dekat batas yang dipersyaratkan dalam kontrak hutang maka semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran kontrak hutang (Reskino & Vemilyarni, 2014), dalam situasi tersebut ada kemungkinan bahwa manajer akan memilih metode akuntansi yang lebih optimis. Perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi memiliki kecenderungan untuk konservatif karena pemberi pinjaman berkepentingan atas keamanan dananya, sehingga mereka akan berupaya untuk melindungi dirinya dari tindakan manajemen yang kurang menguntungkan (Guay & Verrecchia, 2007). Penerapan konservatisme akuntansi dapat membatasi manajemen untuk melaporkan laba atau aktiva secara *overstatement* yang mana hal tersebut dapat membahayakan kreditur. Kreditur tidak dapat melihat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang sebenarnya jika laba atau aktiva dilaporkan secara *overstatement*. Jika kenyataannya perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya maka kreditur akan dirugikan. Disamping itu pelaporan laba atau aktiva yang *overstatement* dapat memicu timbulnya risiko litigasi. Ketika litigasi terjadi maka akan merugikan perusahaan yaitu hilangnya kepercayaan *stakeholder*, merusak citra dan reputasi perusahaan sehingga akan berimbas pada harga saham. Selain itu adanya risiko litigasi juga mempengaruhi keputusan kreditur dalam pemberian hutangnya. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang relatif

tinggi yang mana juga memunculkan risiko litigasi akan menerapkan metode akuntansi yang lebih konservatif.

Adanya fenomena skandal keuangan terutama penggelembungan laba yang terjadi pada PT Bumi Resources Tbk, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia dan PT Inovisi Infracom Tbk sebagai akibat dari rendahnya penerapan prinsip konservatisme akuntansi, adanya *research gap* penelitian sebelumnya, serta penelitian mengenai hubungan antara pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap konservatisme akuntansi yang masih baru di Indonesia, maka penulis memilih judul : **“Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Konservatisme Akuntansi dengan Risiko Litigasi sebagai Variabel Moderating.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk memilih metode maupun estimasi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi keuangan yang berkualitas serta dapat dipercaya untuk mengambil keputusan.
3. Skandal keuangan khususnya kasus penggelembungan (*mark up*) laba pada laporan keuangan yang terjadi di Indonesia mengindikasikan perlunya diterapkan prinsip konservatisme akuntansi.

4. Penelitian mengenai pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap konservatisme akuntansi termasuk penelitian baru di Indonesia.
5. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi menunjukkan hasil yang tidak konsisten.
6. Secara teoritik, adanya risiko litigasi dapat memoderasi pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dan tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi.

1.3 Cakupan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada permasalahan yang tercakup di bawah ini, yaitu:

1. Pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap konservatisme akuntansi.

Mengingat penelitian mengenai pengaruh *corporate social responsibility* terhadap konservatisme akuntansi masih baru di Indonesia terutama pada perusahaan pertambangan yang memiliki kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai hal tersebut untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap konservatisme akuntansi.

2. Pengaruh tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi.

Peneliti akan mencoba meneliti kembali mengenai pengaruh tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi karena penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

3. Peran risiko litigasi dalam pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap konservatisme akuntansi.

Risiko litigasi dapat mempengaruhi hubungan antara pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap konservatisme akuntansi.

4. Peran risiko litigasi dalam pengaruh tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi.

Risiko litigasi dapat mempengaruhi hubungan antara tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan yang muncul dan berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap konservatisme akuntansi?
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi?
3. Bagaimanakah pengaruh risiko litigasi dalam memoderasi pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap konservatisme akuntansi?
4. Bagaimanakah pengaruh risiko litigasi dalam memoderasi pengaruh tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap konservatisme akuntansi.
2. Menganalisis pengaruh tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi.
3. Menganalisis peran risiko litigasi dalam memoderasi pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap konservatisme akuntansi.
4. Menganalisis peran risiko litigasi dalam memoderasi pengaruh tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi.

1.6 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritikal dalam pengembangan literatur akuntansi secara khususnya dan ekonomi untuk lebih luasnya, maupun menjadi suatu alat bukti yang berlaku di lapangan empiris. Lebih lanjutnya untuk memberikan suatu pertimbangan analitik dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi di suatu perusahaan. Khususnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), tingkat hutang dan risiko litigasi dalam mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi.

Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan dan memilih metode akuntansi agar laporan yang dihasilkan dapat bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pembaca

Penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi dengan risiko litigasi sebagai variabel moderating. Orisinalitas penelitian ini yaitu dengan menghadirkan risiko litigasi sebagai variabel moderating yang diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Teori Utama

2.1.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi berasal dari konsep legitimasi organisasi yang diungkapkan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) yang didefinisikan sebagai suatu kondisi atau status dimana organisasi atau entitas berusaha untuk membangun kesesuaian antara nilai-nilai sosial yang terkait dengan kegiatan mereka dan norma-norma perilaku yang dapat diterima dalam sistem nilai masyarakat yang lebih luas di tempat organisasi atau entitas tersebut berada. Teori legitimasi menurut O'Donovan (2002) merupakan sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat yang akan menjadi manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Maka dapat dikatakan bahwa teori legitimasi merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka pengembangan perusahaan ke depan (Hadi, 2011). Teori legitimasi mencakup gagasan tentang kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat (Jupe, 2005).

Ghozali dan Chariri (2014:442) berpendapat bahwa teori legitimasi ini berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam hal ini perusahaan berusaha untuk memenuhi harapan masyarakat dan memposisikan diri sebaik mungkin di tengah masyarakat yang semakin maju agar dapat mempertahankan legitimasinya. Legitimasi akan mengalami pergeseran seiring dengan perubahan lingkungan dan masyarakat tempat perusahaan berada

(Lindawati & Puspita, 2015). Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia merupakan salah satu contoh yang melatarbelakangi pergeseran dari legitimasi. Di dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber power intitusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang permanen. Oleh karena itu suatu intitusi harus lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan jasa perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari penghargaan yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat (Ghozali & Chariri, 2014:442).

Perusahaan dapat memperoleh legitimasi apabila nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Ketika terdapat perbedaan antara dua sistem nilai tersebut akan memicu ancaman legitimasi bagi organisasi. Ancaman ini dapat berupa sanksi sosial, hukum, ekonomi dan lainnya (Dowling & Pfeffer, 1975). Perbedaan yang terjadi antara nilai perusahaan dengan nilai sosial masyarakat sering dinamakan "*legitimacy gap*" dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Warticl dan Mahon (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2014:443) menyebutkan bahwa *legitimacy gap* terjadi karena 3 (tiga) alasan:

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah.

3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Adanya *legitimacy gap* sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara aktifitas operasi perusahaan dengan harapan masyarakat memunculkan tekanan dari *stakeholders* (Grahovar, 2011) dan juga memicu terjadinya protes dari *stakeholder* terhadap perusahaan yang berdampak pada eksistensi perusahaan dan mengganggu stabilitas operasional yang berakhir pada profitabilitas perusahaan (Lindawati & Puspita, 2015). *Legitimacy gap* dapat dikurangi dengan meningkatkan kesesuaian pada operasi perusahaan dan harapan masyarakat salah satunya meningkatkan tanggung jawab sosial dan melakukan pengungkapan informasi perusahaan.

Kegiatan operasional perusahaan menimbulkan dampak yang beragam bagi kehidupan di sekitar perusahaan tersebut berada. Semakin besar perusahaan maka semakin luas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan. *Legitimacy theory* membawa pandangan bahwa organisasi harus secara terus-menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Rustiarini, 2011). Perusahaan dapat menggunakan pengungkapan atas aktivitas operasionalnya sebagai alat untuk mengomunikasikan bahwa kegiatan perusahaan yang dilakukan telah sesuai dengan batasan dan norma yang berlaku di masyarakat. Deegan (2002) menyatakan bahwa dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika pihak manajemen menganggap bahwa hal tersebut adalah yang diharapkan oleh komunitas.

Implikasi teori legitimasi dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap konservatisme akuntansi. Deegan (2002) menyatakan bahwa legitimasi dapat diperoleh jika terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan yang tidak mengganggu atau sesuai dengan sistem nilai yang ada di masyarakat dan lingkungan. Perusahaan hendaknya memperhitungkan faktor sosial sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial masyarakat untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dan untuk meningkatkan legitimasi (pengakuan) baik dari investor, kreditur, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Pengungkapan informasi CSR merupakan investasi jangka panjang dan memiliki manfaat dalam meningkatkan citra, reputasi dan legitimasi perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai basis konstruksi strategi perusahaan (Rindawati & Asyik, 2015).

Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi alat yang digunakan untuk mengubah pandangan para *stakeholder* (Cheng & Kung, 2016) dan merupakan sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat dan memperbaiki legitimasi yang diperoleh perusahaan dari *stakeholder*-nya (Lindawati & Puspita, 2015). Pengungkapan ini menunjukkan tingkat kepatuhan suatu perusahaan (Branco & Rodrigues, 2008) terhadap aturan yang berlaku termasuk dalam pelaporan keuangannya dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki etika bisnis yang baik sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Ketika perusahaan memiliki reputasi yang baik dan memperoleh dukungan dari masyarakat serta *stakeholder* lainnya, perusahaan akan melarang

manajemen untuk terlibat dengan kegiatan yang bertentangan dengan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya seperti dalam kasus pelaporan laba yang *overstatement* yang mana akan memicu ancaman legitimasi dan keberlangsungan hidup perusahaan. Perusahaan akan lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak kehilangan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, salah satu caranya adalah dengan menerapkan akuntansi yang konservatif karena dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen untuk melaporkan laba yang berlebihan demi kepentingannya sendiri dan dapat menghadapi ketidakpastian laba atau rugi. Beyer, *et al.* (2010) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi dapat meningkatkan ketepatan informasi dan mengurangi asimetri informasi. Biaya litigasi karena perilaku oportunistik manajemen yang ingin memanipulasi laba juga dapat terhindar dengan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. Sehingga pengungkapan CSR yang maksimal akan mempengaruhi perusahaan untuk menerapkan konservatisme akuntansi selain untuk mempertahankan legitimasi juga menghindari ancaman litigasi yang dapat merusak kepercayaan para pemangku kepentingan.

2.1.2 Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa (Ghozali & Chariri, 2014:69). Teori akuntansi positif didasarkan pada dalil bahwa manajer, pemegang saham, politis berpikir rasional berusaha untuk memaksimalkan kegunaan mereka yang secara langsung berhubungan dengan kompensasi dan kesejahteraan mereka (Belkaoui, 2007).

Menurut Watts dan Zimmerman (1990) dalam Gozhali dan Chariri (2014:70), teori akuntansi positif berusaha menguji tiga hipotesis sebagai berikut:

1) Hipotesis Rencana Bonus (*Plan Bonus Hypothesis*)

Manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dan dewan direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih.

2) Hipotesis Hutang/ Ekuitas (*Debt/ Equity Hypothesis*)

Makin tinggi rasio hutang/ ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi rasio hutang/ ekuitas, makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian/ peraturan kredit. Makin tinggi batasan kredit, makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

3) Hipotesis Cost Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan variabel proksi dari aspek politik. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Disamping itu, pihak lain dalam proses politik dalam rangka menegakkan aturan

hukum dan regulasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, individu yang rasional cenderung memilih untuk tidak mengetahui informasi yang lengkap. Proses politik tidak berbeda jauh dengan proses pasar. Atas dasar *cost* informasi dan *cost monitoring* tersebut, manajer memiliki insentif untuk memilih laba akuntansi tertentu dalam proses politik tersebut.

Godfrey, *et al.* (1997) dalam Gozhali dan Chariri (2014:71) menjelaskan bahwa tiga hipotesis di atas menunjukkan bahwa teori akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan yaitu hubungan antara manajemen dengan pemilik, hubungan antara manajemen dengan kreditor, dan hubungan antara manajemen dengan pemerintah. Teori akuntansi positif dalam penelitian ini dikembangkan dengan maksud menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi antar perusahaan yang difokuskan pada dua alasan. Alasan pertama adalah alasan oportunistik yang digunakan perusahaan dalam memilih metode akuntansi tertentu. Alasan oportunistik ini sering disebut *ex-post* yaitu pemilihan metode akuntansi dilakukan sesudah diketahui adanya fakta. Alasan kedua adalah alasan efisiensi berkaitan dengan metode akuntansi yang dipilih guna mengurangi biaya kontrak antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Alasan efisiensi disebut dengan *ex-ante* karena pemilihan metode akuntansi dilakukan sebelum fakta diketahui.

Implikasi dari teori akuntansi positif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi. Semakin tinggi tingkat hutang pada suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan tersebut melanggar kontrak hutang. Oleh karena itu kreditor menuntut agar perusahaan menerapkan akuntansi yang konservatif dalam pelaporan

keuangan sehingga dapat membatasi perilaku oportunistik manajer dalam melebihi jumlah laba periode sekarang. Konservatisme akuntansi dapat melindungi kreditur dari tindakan manajer yang dapat meningkatkan risiko yang tidak menguntungkan pemberi dana atau kreditur. Ahmed, *et al.* (2000) menyatakan bahwa tingkat hutang perusahaan memicu konflik antara pemegang saham dan kreditur. Semakin besar hutang perusahaan, maka akan memperbesar konflik karena kreditur tidak ingin adanya kelebihan pembayaran untuk pemegang saham yang akan mengakibatkan semakin berkurangnya bagian untuk kreditur. Oleh karena itu kreditur akan menuntut penerapan akuntansi yang lebih konservatif pada perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi. Penerapan metode akuntansi yang konservatif juga dapat memungkinkan kreditur untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang sebenarnya karena perusahaan mengakui *bad news* (beban dan rugi) dengan segera daripada mengakui *goodnews* (laba dan pendapatan).

2.1.3 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder theory mulai dikenal sejak tahun 1970an. Freeman (1984) dalam Lindawati dan Puspita (2015) menyatakan bahwa istilah *stakeholder* diperkenalkan pertama kali oleh *Stanford Research Institute* (SRI) di tahun 1963 dan mendefinisikan *stakeholder* sebagai sebuah organisasi, grup atau individu yang dapat dipengaruhi dan memengaruhi tujuan organisasi tersebut. Perusahaan hendaknya tidak hanya terfokus untuk memakmurkan pemegang saham saja, tetapi juga pihak lain yang harus memiliki hak yang sama untuk menerima manfaat dari keberadaan perusahaan itu sendiri (Lin & Amin, 2016). Pihak lain ini adalah para

pemangku kepentingan seperti kreditor, karyawan, masyarakat, konsumen, *supplier*, analis, pemerintah dan pihak lain (Sriayu & Mimba, 2013). *Stakeholder* ini mempercayai bahwa apabila perusahaan memiliki etika bisnis yang baik akan membawa nilai positif pada perusahaan.

Cheng dan Kung (2016) menyatakan bahwa teori *stakeholder* membawa pandangan bahwa perusahaan menginvestasikan sumber daya untuk memenuhi harapan *stakeholder* dalam rangka untuk memperoleh dukungan mereka atau untuk menghindari menarik perhatian yang tidak diinginkan dari kelompok-kelompok eksternal. Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan (Gozhali & Chariri, 2014:439). Eksistensi perusahaan membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan dan dukungan tersebut harus dicari sehingga kegiatan perusahaan disesuaikan dengan harapan *stakeholder* untuk mendapatkan dukungan itu. Semakin kuat *stakeholder*, semakin banyak perusahaan harus beradaptasi (Gray, *et al.*, 1995). Teori *stakeholder* dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya (E & Clarkson, 1995) yaitu:

1. *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat mempertahankan keberlangsungan hidup (*going concern*) yaitu *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai *stakeholder* publik yaitu, pemerintah dan komunitas (organisasi lingkungan).
2. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang memengaruhi atau dipengaruhi perusahaan tetapi mereka tidak berhubungan

dengan transaksi yang terjadi di perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya seperti media masa dan masyarakat luas.

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang mereka miliki atas sumber tersebut. *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan, 2000) dalam (Chariri & Gozhali & Chariri, 2014:440). Ketika *stakeholder* mampu untuk mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang dapat memuaskan keinginan *stakeholder*.

Pengungkapan informasi keuangan, sosial dan lingkungan merupakan dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya dan menyediakan informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mengubah persepsi dan ekspektasi (Adam & McNicholas, 2007). Pengungkapan tersebut dilakukan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para *stakeholder* serta mendapatkan dukungan dari para *stakeholder* demi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Semakin baik pengungkapan yang dilakukan perusahaan maka *stakeholder* akan semakin memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan perusahaan (Lindawati & Puspita, 2015). Dapat dikatakan juga bahwa perusahaan

yang memiliki pengungkapan informasi keuangan, sosial dan lingkungan yang baik, maka perusahaan tersebut telah mematuhi peraturan yang berlaku dan telah memenuhi harapan *stakeholder*-nya sehingga perusahaan dapat memenuhi hak-hak *stakeholder* dengan baik.

Implikasi teori *stakeholder* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh pengungkapan CSR terhadap konservatisme akuntansi yang dimoderasi dengan risiko litigasi. Konservatisme telah lama dianggap sebagai indikator penting dalam kualitas laporan keuangan (Basu, 1997). Watts (1993) dalam Purnama H dan Daljono (2013) berpendapat bahwa akuntansi konservatisme meningkatkan efisiensi dari kontrak hutang antara *shareholder* dan *bondholders*. Pengaplikasian prinsip konservatisme dalam laporan keuangan dapat mengurangi kemungkinan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan serta mengurangi biaya agensi (LaFond & Watts, 2008) dan juga dapat mengurangi biaya litigasi (Cheng & Kung, 2016).

Fombrun dan Shanley (1990) dalam Cheng dan Khung (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial akan meningkatkan dan mempertahankan reputasi perusahaan, perusahaan yang telah memiliki reputasi yang baik cenderung melarang manajemen untuk terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan harapan *stakeholder*-nya. Informasi keuangan merupakan salah satu hal yang harus diungkapkan oleh perusahaan, selain pengungkapan sosial dan lingkungan. Pengungkapan aktivitas perusahaan yang maksimal akan menghambat perilaku moral yang cenderung memanipulasi laba untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder*, dengan secara sukarela menyediakan informasi keuangan

yang transparan dan dapat diandalkan serta laporan keuangan yang berkualitas (Cheng & Kung, 2016). Menyediakan informasi keuangan yang transparan dan dapat diandalkan dianggap sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (Salewski & Zulch, 2013) salah satunya adalah dengan cara menyajikan laporan keuangan yang konservatif.

Risiko litigasi diartikan sebagai risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan (Juanda, 2009). Ketika perusahaan telah memenuhi harapan *stakeholder*, perusahaan akan terhindar dari ancaman litigasi. Pengungkapan CSR adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh dukungan dari *stakeholder* dan meningkatkan reputasi. Perusahaan yang telah memiliki reputasi yang baik akan menghindari kegiatan yang akan merusak kepercayaan para pemangku kepentingan dan cenderung patuh pada peraturan yang berlaku termasuk dalam pelaporan akuntansi dan dapat dipastikan memiliki etika bisnis yang baik. Oleh karena itu perusahaan yang mengungkapkan CSRnya dengan maksimal akan lebih konservatif dalam pernyataan laba dan aset bersih. Hal tersebut dikarenakan menurut Kellog (1984) dalam Lasdi (2009), pernyataan laba atau aset bersih yang berlebihan lebih cenderung menyebabkan tuntutan hukum daripada pernyataan laba atau aset yang lebih rendah. Litigasi adalah ancaman yang ditakuti oleh perusahaan karena hal tersebut dapat merusak reputasi dan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang mengungkapkan CSR sesuai dengan undang-undang akan cenderung lebih konservatif terlebih jika ditambah dengan adanya kemungkinan ancaman litigasi.

Teori *stakeholder* juga digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan pengaruh tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi dengan risiko litigasi sebagai variabel moderasi. Semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka semakin dekat perusahaan pada batas yang dipersyaratkan dalam kontrak hutang. Semakin dekat batas yang dipersyaratkan dalam kontrak hutang maka semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran kontrak hutang (Reskino & Vemiliyarni, 2014), dalam situasi tersebut ada kemungkinan bahwa manajer akan memilih metode akuntansi yang lebih optimis yang mana akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar kontrak hutang dan menghindari perusahaan dari biaya renegosiasi kontrak.

Perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi memiliki kecenderungan untuk konservatif karena pemberi pinjaman berkepentingan atas keamanan dananya, sehingga mereka akan berupaya untuk melindungi dirinya dari tindakan manajemen yang kurang menguntungkan (Guay & Verrecchia, 2007). Hal tersebut juga dapat disebabkan karena kreditur sebagai *stakeholder* tidak ingin adanya kelebihan pembayaran untuk pemegang saham yang akan mengakibatkan semakin berkurangnya bagian untuk kreditur. Metode akuntansi konservatisme dapat membatasi manajemen untuk melaporkan laba atau aktiva secara berlebihan (*overstatement*) yang mana hal tersebut dapat membahayakan kreditur. Kreditur tidak dapat melihat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang sebenarnya jika laba atau aktiva dilaporkan secara *overstatement*. Jika kenyataannya perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya maka kreditur akan dirugikan. Disamping itu pelaporan laba atau aktiva yang

overstatement dapat memicu timbulnya risiko litigasi. Ketika litigasi terjadi maka akan merugikan perusahaan yaitu hilangnya kepercayaan *stakeholder*. Selain itu tuntutan hukum yang dialami perusahaan akan merusak citra dan reputasi perusahaan sehingga akan berimbas pada harga saham. Risiko litigasi juga mengakibatkan perusahaan mengeluarkan biaya yang banyak untuk menyelesaikan tuntutan hukum. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang relatif tinggi yang mana juga memunculkan risiko litigasi akan menerapkan metode akuntansi yang lebih konservatif.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi dapat didefinisikan sebagai kebijakan atau kecenderungan akuntansi yang berkontribusi dalam menurunkan nilai aktiva bersih relatif terhadap nilai aktiva bersih ekonomi (Ruch & Taylor, 2015). Definisi resmi *Financial Accounting Standard Board* (FSAB) dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC No.2) menyatakan:

“Conservatism is a prudent reaction to uncertainty to try to ensure that uncertainties and risk inherent in business situation are adequately considered”

Konservatisme dalam SFAC diartikan sebagai reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian dalam mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko pada suatu bisnis telah dipertimbangkan. Basu (1997) menginterpretasikan konservatisme sebagai kecenderungan yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba (*good news*)

dibandingkan mengakui rugi (*bad news*). Secara tradisional, Bliss (1924) dalam Watts (2003) mengartikan konservatisme yaitu tidak mengantisipasi keuntungan, tetapi mengantisipasi semua kerugian. Sementara Watts (2003) sendiri mendefinisikan konservatisme akuntansi sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui jika terjadi kemungkinan kerugian dan hutang. Selain definisi tersebut. Menurut Suwardjono (2017) konservatisme adalah tindakan kehati-hatian dalam pembuatan laporan keuangan diimplikasikan dengan mengakui biaya atau rugi yang mungkin akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi merupakan suatu kebijakan dimana manajemen berhati-hati dalam memilih metode akuntansi yang menetapkan nilai terendah dalam pengukuran aset, memperlambat pengakuan laba, mempercepat pengakuan hutang, beban dan kerugian serta memberikan informasi yang paling tidak menguntungkan bagi pemilik perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi adanya risiko ketidakpastian.

Watts (2003) mempertimbangkan beberapa hal yang dapat menjadi alasan pemilihan prinsip konservatisme akuntansi pada perusahaan yaitu:

1) *Contacting Explanation*

Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang memiliki langkah-langkah atau standar verifikasi yang ketat untuk lebih cepat mengakui kerugian daripada keuntungan. Dengan demikian, penerapan konservatisme dapat membentuk

mekanisme kontrak yang efisien antara perusahaan dan pihak eksternal. Atas dasar penjelasan kontrak, konservatisme akuntansi dapat digunakan untuk menghindari *moral hazard* yang disebabkan oleh pihak-pihak yang mempunyai asimetri informasi, pembayaran asimetris, horizon waktu yang terbatas dan tanggung jawab yang terbatas, serta aset bersih dan pendapatan kumulatif lebih kecil kemungkinannya untuk dibesar-besarkan dan mengurangi kemungkinan distribusi yang dapat melanggar kontrak

2) *Litigation*

Risiko litigasi berkaitan dengan posisi kreditur dan investor sebagai pihak yang memperoleh perlindungan hukum. Risiko terjadinya litigasi disebabkan oleh tidak terpenuhinya kepentingan investor dan kreditur. Informasi yang disajikan secara *overstatement* dapat memicu investor ataupun kreditur untuk melakukan litigasi atau tuntutan hukum demi memperjuangkan hak-haknya. Biaya litigasi akibat dari pelaporan yang *overstatement* lebih tinggi karena pelaporan yang *overstated* meningkatkan kecurigaan *stakeholder* dibandingkan dengan pelaporan yang *understatement*, untuk itu manajemen dan auditor memiliki dorongan untuk melaporkan nilai laba dan aset yang lebih konservatif.

3) *Taxation*

Penerapan akuntansi yang konservatif dilakukan dalam upaya memperkecil pajak penghasilan perusahaan. Manajemen dapat memilih metode yang cenderung konservatif dalam rangka menekan biaya pajak sepanjang diperbolehkan dalam SAK yang berlaku.

4) *Accounting Regulation*

Regulasi yang berlaku mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang konservatif. Kerugian dari aset yang dinilai terlalu tinggi dan pendapatan yang terlalu tinggi lebih dapat diamati dan digunakan dalam proses politik daripada hilangnya keuntungan karena nilai aset yang kurang atau pendapatan yang rendah. Fenomena ini memberikan dorongan bagi regulator dan pembuat standar untuk bersikap konservatif. Negara-negara yang memiliki tingkat regulasi yang tinggi cenderung menerapkan konservatisme lebih tinggi daripada negara-negara yang memiliki regulasi yang rendah karena manajemen diberikan pilihan untuk menyelenggarakan akuntansi yang konservatif.

2.2.1.1 Manfaat Konservatisme Akuntansi

Watts (2003) menjelaskan beberapa manfaat penerapan konservatisme akuntansi bagi perusahaan antara lain:

- 1) Membatasi manajer dalam berperilaku oportunistik

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi maupun keputusan yang berkaitan dengan manajemen. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi perilaku oportunistik manajemen untuk mempengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan untuk memaksimalkan kepentingannya. Dalam hal ini prinsip konservatisme akuntansi dapat digunakan untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen tersebut.

2) Meningkatkan nilai perusahaan

Konservatisme dapat membatasi *opportunistic payment* bonus kepada manajer dan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Dengan pemberian bonus kepada manajer, maka manajer akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya atas wewenang dari pemegang saham sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

3) Mengurangi adanya potensi tuntutan hukum atau litigasi

Tuntutan hukum lebih banyak muncul ketika laba dan aset dicatat terlalu tinggi karena pencatatan laba dan aset yang terlalu tinggi meningkatkan kecurigaan investor dan kreditur terhadap perusahaan. Sehingga adanya potensi tuntutan hukum akibat pencatatan yang *overstatement*, membuat manajemen dan auditor terdorong untuk melaporkan laba dan aset yang konservatif.

4) Menaati peraturan

Peraturan yang dibuat oleh penyusun standar akuntansi memberikan dorongan kepada perusahaan untuk menerapkan akuntansi konservatif seperti pengakuan secara *historical cost* ketika terjadi kenaikan harga sepanjang tahun.

2.2.1.2 Jenis Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi terbagi menjadi dua jenis yaitu konservatisme bersyarat (*conditional conservatism*) dan konservatisme tak bersyarat (*unconditional conservatism*). Perbedaan utama dari kedua bentuk konservatisme adalah bahwa penerapan *conditional conservatism* tergantung pada peristiwa atau kejadian ekonomi, sedangkan *unconditional conservatism* tidak. *Conditional conservatism* terjadi ketika *bad news* diakui (Ruch & Taylor, 2015).

Conditional conservatism terjadi ketika *bad news* lebih diakui dalam laba akuntansi dengan cara yang lebih tepat daripada *good news*. Dengan kata lain, *conditional conservatism* dicirikan oleh pengakuan asimetris terhadap *good news* dan *bad news* (Ruch & Taylor, 2015). Pada kondisi tersebut nilai aktiva mengalami penurunan sebagai respon terhadap *bad news* dan tidak dinaikkan kembali ketika terjadi *good news*. Konservatisme jenis ini muncul ketika perusahaan mengalami kerugian ekonomis, yaitu kerugian yang diakui pada saat terjadinya atau berdasarkan basis waktu. Contoh dari penerapan *conditional conservatism* adalah ketika perusahaan mengalami tuntutan litigasi, maka cenderung melakukan *overstatement* pada kewajiban dan *understatement* pada aset (Guay & Verrecchia, 2007). Contoh lain dari *conditional conservatism* adalah menggunakan biaya atau pasar yang lebih rendah saat menghitung persediaan dan mencatat kerusakan untuk aset berwujud atau tidak berwujud yang berumur panjang (Hansen, *et al.*, 2018)

Unconditional conservatism terjadi ketika pengakuan terhadap aset bersih kurang konsisten (Ruch & Taylor, 2015) atau ketika aset dan liabilitas pada awalnya dicatat pada saat penerimaan kemudian proses akuntansi mengarah pada *good will* yang tidak dicatat (Hansen, *et al.*, 2018). Konservatisme jenis ini dilakukan tanpa melihat kondisi perusahaan, sehingga tidak mengacu pada pengakuan kerugian yang berbasis waktu dan mengakui kerugian di awal. Terlepas dari apakah itu *bad news* atau *good news*. Contoh dari *unconditional conservatism* adalah segera mencatat beban penelitian dan pengembangan di awal (Ruch & Taylor, 2015). Contoh lain adalah menentukan metode depresiasi ketika perusahaan membeli aset. Investor lebih menyukai *conditional conservatism* karena jenis ini akan

menggambarkan lebih jelas mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan dan dapat membantu dalam pembuatan keputusan investasi yang tepat (Guay & Verrecchia, 2007).

2.2.1.3 Konservatisme Akuntansi dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK)

Ketidakpastian ekonomi di masa depan mengharuskan perusahaan untuk berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang sesuai dengan kondisi perusahaan karena Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kebebasan kepada setiap perusahaan dalam memilih metode akuntansi yang digunakan (Hertina & Zulaikha, 2017). Kebebasan untuk memilih metode akuntansi dapat menghasilkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Setiap metode akuntansi yang dipilih memiliki tingkat konservatisme yang berbeda-beda. Ada beberapa metode dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terkait dengan penerapan prinsip konservatisme, diantaranya adalah:

- 1) PSAK No. 14 tentang persediaan. Perusahaan dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode: *FIFO (First in First Out)*, rata-rata tertimbang atau *LIFO (Last in First Out)*.
- 2) PSAK No. 16 mengenai aset tetap dan pilihan dalam menghitung biaya penyusutan. Metode yang dapat digunakan antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit.

- 3) PSAK No. 19 mengenai aset tidak berwujud berkaitan dengan amortisasi untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aset tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada standar lainnya. Pernyataan ini juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tidak berwujud dan menentukan pengungkapan yang harus dilakukan bagi aset tidak berwujud. Metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah aset tidak berwujud yang serupa dengan penyusutan pada aset tetap meliputi: metode garis lurus, metode saldo menurun berganda, dan metode jumlah unit produksi.
- 4) PSAK No. 20 mengatur biaya riset dan pengembangan, PSAK ini menyebutkan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan. Apabila besar kemungkinan biaya tersebut akan meningkatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan biaya tersebut dapat diukur secara andal, maka biaya-biaya tersebut memenuhi syarat diakui sebagai aset.

2.2.1.4 Pengukuran Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi dapat diukur menggunakan beberapa pengukuran. Berikut beberapa pengukuran konservatisme jika dikelompokkan sesuai dengan pendekatan Watts (2003) (Haniati & Fitriany, 2010).

1) *Earning/ Stock Return Relation Measure*

Stock market price berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai aset pada saat terjadinya perubahan, baik perubahan atas rugi ataupun laba tetap dilaporkan sesuai dengan waktunya. Basu (1997) menyatakan bahwa konservatisme

menyebabkan kejadian-kejadian yang merupakan kabar buruk atau kabar baik terefleksi dalam laba yang tidak sama (asimetri waktu pengakuan). Hal ini disebabkan karena kejadian yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan harus segera diakui sehingga mengakibatkan *bad news* lebih cepat terefleksi dalam laba dibandingkan *good news*. Dalam modelnya, Basu menggunakan model *piecewise-linear regression* sebagai berikut:

$$\Delta NI_t = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta NI_{t-1} + \alpha_2 D \Delta NI_{t-1} + \alpha_3 D \Delta NI_{t-1} \times \Delta NI_{t-1} + \varepsilon_t$$

Dimana ΔNI_t adalah *net income* sebelum adanya *extraordinary items* dari tahun t-1 hingga t, yang diukur dengan menggunakan total aset awal nilai buku. Sedangkan $D \Delta NI_{t-1}$ adalah *dummy variable*, dimana bernilai 1 jika perubahan ΔNI_{t-1} bernilai negatif.

2) *Earning/ Accrual Measure*

a. Model Givoly dan Hayn (2000)

Haniati dan Fitriany (2010) menjelaskan bahwa Givoly dan Hayn memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/ amortisasi dan arus kas kegiatan operasi.

Semakin besar akrual negatif maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Hal ini dilandasi oleh teori bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat penggunaan biaya. Sehingga, laporan laba rugi yang konservatif akan menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut dibandingkan dan dijadikan

cadangan pada neraca (Sari, 2004). Sebaliknya laporan keuangan yang optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual yang dihasilkan lebih positif.

Depresiasi dikeluarkan dari *net income* dalam perhitungan konservatisme akuntansi karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang ada dalam *net income* tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan (Haniati & Fitriany, 2010).

b. Model Zang (2007)

Zhang (2007) menggunakan *conv_accrual* sebagai salah satu pengukuran konservatisme. *Conv_accrual* didapatkan dengan membagi akrual non operasi dengan total aset. Akrual non operasi memperlihatkan pencatatan kejadian buruk yang terjadi dalam perusahaan, contohnya biaya restrukturisasi dan penghapusan aset. Pengukuran ini dihitung dengan cara mengalikan *conv_accrual* dengan -1 bertujuan untuk mempermudah analisa. Dimana semakin tinggi nilai *conv_accrual* menunjukkan penerapan konservatisme yang semakin tinggi juga (Haniati & Fitriany, 2010).

3) *Net Asset Measure*

Ukuran ketiga yang digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme dalam laporan keuangan adalah nilai aktiva yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement*. Salah satu model pengukurannya adalah proksi pengukuran yang digunakan yaitu dengan menggunakan *market to book ratio* yang

mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya.

Konservatisme akuntansi dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran akrual mengacu pada Givoly dan Hayn (2000). Model ini dilandasi oleh teori Basu (1997) yang menyatakan bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. Pada model Givoly dan Hayn (2000) konservatisme dilihat dari perbandingan antara laba sebelum *extraordinary items* dikurangi depresiasi dengan arus kas operasionalnya. Artinya semakin konservatif maka jumlah laba sebelum *extraordinary items* akan lebih rendah dibandingkan dengan arus kas operasionalnya. Alasan menggunakan model ukuran akrual adalah karena penelitian ini lebih memfokuskan pada pembahasan konservatisme dalam kaitannya dengan laba rugi, bukan mengenai reaksi pasar, sehingga model akrual tepat digunakan. Rumus yang digunakan untuk menghitung konservatisme akuntansi adalah sebagai berikut:

$$\text{CONACC} = \text{NI}_{it} - \text{CFO}_{it}$$

CONACC = Tingkat konservatisme akuntansi

NI_{it} = Laba sebelum *extraordinary items* pada perusahaan i tahun t
dikurangi depresiasi dan amortisasi

CFO_{it} = Arus kas dari kegiatan operasi pada perusahaan i tahun t

Hasil perhitungan konservatisme akuntansi (CONACC) dikalikan dengan -

1. Hal ini untuk memastikan bahwa nilai yang positif mengindikasikan tingkat konservatisme yang lebih tinggi dan memudahkan untuk analisa.

2.2.2 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh perseroan berkaitan dengan kegiatan sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama bagi setiap perseroan yang kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. CSR sebagai sebuah kewajiban bagi perusahaan tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74, serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional (Marnelly, 2012). CSR dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut (Widjaja & Yeremia, 2008). Sementara menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR juga dapat didefinisikan

sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan para karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar serta publik pada umumnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka (*The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* dalam Marnelly, 2012).

Perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan instrumen internasional dalam menjalankan program CSR seperti: 1) *ISO 26000 on Social Responsibility*; 2) *Ten Principles of United Nation Global Compact*; 3) *RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil)*; 4) *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*; 5) *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*; 6) *The Equator Principles*. ISO 26000 tidak menggunakan istilah CSR tetapi hanya *Social Responsibility*, dengan pertimbangan pedoman ISO 26000 diperuntukkan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. Menurut ISO 26000 dalam Sefriani dan Sri Wartini (2017) tentang *Guidance standard on Social responsibility* ada 7 isu pokok yang harus dilaksanakan perusahaan dalam program CSR nya meliputi:

- 1) Pengembangan masyarakat
- 2) Konsumen
- 3) Praktik kegiatan institusi yang sehat
- 4) Lingkungan
- 5) Ketenagakerjaan
- 6) Hak Asasi Manusia (HAM)
- 7) *Organizational Governance*

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 (Sefriani & Wartini, 2017) meliputi:

- 1) Kepatuhan kepada hukum
- 2) Menghormati instrumen/ badan-badan internasional
- 3) Menghormati *stakeholders* dan kepentingannya
- 4) Akuntabilitas
- 5) Transparansi
- 6) Perilaku yang beretika
- 7) Melakukan tindakan pencegahan
- 8) Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia

Dalam konsep *sustainability development*, keberlanjutan suatu perusahaan bergantung pada seberapa besar perusahaan dapat bertanggungjawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab *financial*. Tanggung jawab kemudian dikomunikasikan oleh perusahaan kepada *stakeholders* melalui pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Lindawati & Puspita, 2015). Melalui pengungkapan CSR *stakeholder* dapat mengetahui itikad baik perusahaan untuk mematuhi peraturan pemerintah dan menciptakan etika bisnis yang baik, sehingga reputasi perusahaan menjadi meningkat. Terlebih *stakeholder* akan lebih memperhatikan perusahaan yang memiliki aktivitas sosial yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat pada khususnya (Cahyonowati & Darsono, 2013).

Pengungkapan *corporate social responsibility* pada penelitian ini menggunakan indikator GRI versi 4.0 (GRI G4) yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* yang terdiri dari 91 item pengungkapan yang terdiri dari 6 indikator yaitu indikator ekonomi (9 item), lingkungan (34 item), praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja (16 item), hak asasi manusia (12 item), masyarakat (11 item) dan tanggung jawab atas produk (9 item). Penelitian menggunakan GRI G4 dikarenakan lebih komprehensif dalam menilai aktivitas CSR suatu perusahaan. Pengungkapan CSR dilakukan dengan cara *menceklist* satu-persatu item GRI G4. Apabila item tersebut diungkapkan maka diberi skor 1, sedangkan jika tidak diungkapkan maka diberi skor 0. Skor di setiap item pengungkapan dijumlahkan dan dibagi dengan total item pengungkapan sehingga diperoleh skor pengungkapan untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan pengungkapan *corporate social responsibility* adalah sebagai berikut:

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Keterangan:

$CSRI_j$ = Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

$\sum x_{yi}$ = nilai 1 = jika item y_i diungkapkan; 0 = jika item y_i tidak diungkapkan.

n_i = jumlah item untuk perusahaan i , $n_i \leq 91$

2.2.3 Tingkat Hutang

Tingkat hutang yang diproksikan dengan *leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki beban tetap (Yuliarti & Yanto, 2017). *Leverage* dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan

dibiayai oleh hutang dan perbandingannya dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Leverage* juga dapat menjadi suatu indikasi bagi pemberi pinjaman untuk tingkat keamanan pengembalian dana yang telah diberikan kepada perusahaan (Alfian & Sabeni, 2013). Hal tersebut didasari oleh struktur modal yang digambarkan oleh rasio *leverage*, dengan begitu tingkat risiko tak tertagih suatu hutang dapat diketahui (Savitri, 2016). *Leverage* terdiri dari dua jenis rasio yaitu *leverage* operasi (*operating leverage*) dan *financial leverage*. *Operating leverage* menitikberatkan pada biaya tetap dalam arus pendapatan suatu perusahaan. Dalam memahami *operating leverage*, dapat digunakan suatu analisis yaitu analisis titik impas. Sedangkan *financial leverage* adalah rasio yang mengukur adanya pengaruh perubahan pada penjualan terhadap pendapatan (per lembar saham perusahaan) (Pratiwi, 2015).

Kasmir (2008) menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis rasio yang ada dalam rasio *leverage*, antara lain:

1) *Debt to asset (debt ratio)*

Debt ratio merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aktiva yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi *debt ratio*, artinya semakin banyak aktiva yang dibiayai dengan hutang. Sebaliknya, semakin rendah *debt ratio*, maka semakin sedikit aktiva yang dibiayai dengan hutang.

Menghitung *debt ratio* dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

2) *Debt to equity ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas. Rasio ini untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Bagi kreditur, semakin tinggi *debt to equity ratio*, maka semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Jika rasio rata-rata industri untuk *debt to equity ratio* sebesar 0,08, perusahaan dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Menghitung *debt to equity ratio* dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3) *Long term debt to equity ratio*

Long term debt to equity ratio (LTDtER) merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan hutang jangka panjang. Menghitung *long term debt to equity ratio* dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$(LTDtER) = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

4) *Times interest earned*

Times interest earned merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar biaya bunga. Jumlah kali perolehan harga bunga digunakan untuk mengetahui sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan malu karena tidak mampu membayar biaya bunga

tahunannya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar biaya bunga pinjaman sehingga menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru. Menghitung *time interest earned* dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax (EBIT)}}{\text{Biaya Bunga (interest)}}$$

5) *Fixed charge coverage*

Fixed charge coverage merupakan rasio yang menyerupai *times interest earned*, hanya saja rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa aktiva tetap berdasarkan kontrak sewa. Menghitung *fixed charge coverage* dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$FCC = \frac{\text{Earning Before Tax} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

Pengukuran tingkat hutang (*leverage*) pada penelitian ini adalah dengan membandingkan total hutang dan total aset (*debt to asset*). Rasio ini menunjukkan seberapa besar aktiva yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

2.2.4 Risiko Litigasi

Risiko litigasi adalah risiko tuntutan hukum yang dapat dilakukan oleh investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat terhadap perusahaan. Risiko litigasi dapat terjadi ketika hak-hak dari pihak yang berkepentingan tidak terpenuhi. Juanda (2009) mengartikan risiko litigasi sebagai risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan. Sebagai contoh litigasi

yang berasal dari kreditur karena ketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek maupun jangka panjang atau litigasi karena pelanggaran kontrak hutang yang dilakukan perusahaan. Contoh lain, investor melakukan litigasi karena pihak perusahaan menjalankan operasi yang akan berakibat pada kerugian bagi pihak investor yang tercermin dari pergerakan harga dan volume saham. Selain itu tuntutan hukum dapat disebabkan adanya laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya sehingga merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Risiko litigasi sebagai faktor kondisi eksternal, didasarkan pada pandangan bahwa investor dan kreditur adalah pihak yang memperoleh perlindungan hukum. Investor maupun kreditur dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya dapat melakukan litigasi dan tuntutan hukum kepada perusahaan (Suryandari & Priyanto, 2012).

Risiko litigasi dapat mengurangi masalah keagenan akibat perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pihak *stakeholder*, sehingga biaya agensi yang besar dapat dihindari. Ancaman litigasi juga dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan meningkatkan efisiensi alokasi modal dengan memperkuat peran akrual dalam keputusan pembiayaan investasi. Hal tersebut karena adanya risiko litigasi mengurangi perilaku oportunistik manajer untuk memanipulasi laporan keuangan dan menimbulkan efek jera dari litigasi (Chung, Wynn, & Yi, 2013).

Dari perspektif pelaporan keuangan dan audit, hukum memastikan bahwa konflik antara manajemen dan pihak yang berkepentingan dapat terselesaikan secara teratur. Tuntutan hukum selain menyebabkan hukuman finansial juga

merusak reputasi perusahaan di mata investor maupun calon investor. Hukuman finansial dan reputasi yang besar dapat mendisiplinkan manajemen dan mencegah mereka dari kesalahan di masa depan (Habib, *et al.*, 2014). Risiko litigasi merupakan mekanisme tata kelola yang penting untuk menjamin kualitas informasi keuangan. Perusahaan lebih cenderung untuk melaporkan kerugian atau laba yang negatif lebih cepat dibandingkan dengan melaporkan pendapatan, untuk mengurangi ancaman litigasi.

Risiko litigasi dapat diukur dari berbagai indikator keuangan yang menjadi faktor kemungkinan terjadinya litigasi. Berikut adalah beberapa pengukuran risiko litigasi:

1) Analisis faktor (*component factor analysis*)

Juanda (2009) melakukan pengukuran risiko litigasi dengan menggunakan analisis faktor terhadap variabel-variabel: 1) beta saham dan perputaran volume saham, keduanya merupakan proksi volatilitas saham; 2) likuiditas dan solvabilitas, keduanya merupakan proksi dari risiko keuangan; 3) ukuran perusahaan yang merupakan proksi dari risiko politik. Adapun tahapan pengukuran risiko litigasi adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung beta (BETA), perputaran saham (TURNOV), likuiditas (LIK), leverage (LEV), ukuran perusahaan (UKR).
- b. Kelima variabel tersebut dikomposit dengan melakukan *component factor analysis* untuk menentukan indeks risiko litigasi. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan risiko litigasi tinggi, dengan demikian sebaliknya untuk nilai indeks yang rendah.

2) Model Regers dan Stocken

Regers dan Sticken (2005) mengukur risiko litigasi dengan menggunakan variabel-variabel yang berhubungan dengan kinerja saham yaitu nilai pasar saham, perputaran volume saham, beta saham, *return* saham, serta *return* minimal. Nilai pasar (SIZE) merupakan nilai saham perusahaan selama satu tahun. Perputaran volume saham (TURN) merupakan rata-rata volume saham yang diperdagangkan dibandingkan dengan rata-rata saham yang beredar. Beta saham (BETA) merupakan slope koefisien dari model pasar. Beta merupakan suatu pengukuran volatilitas *return* suatu saham terhadap *return* pasar yang menggambarkan nilai risiko suatu saham. *Return* saham (RETURN) dihitung dengan mengamati perubahan harga saham bulanan. *Return* minimal (MIN_RET) merupakan perubahan harga saham bulanan yang menghasilkan return paling kecil. Skor LITRISK dihitung dengan menggunakan model persamaan sebagai berikut:

$$\text{LITRISK} = -5.738 + 0.141 (\text{SIZE}) + 0.284 (\text{TURN}) + 0.012 (\text{BETA}) - 0.237 (\text{RETURN}) - 3.161 (\text{MIN_RET})$$

Keterangan:

SIZE = log natural dari nilai pasar saham

TURN = rata-rata volume saham yang diperdagangkan dibandingkan dengan rata-rata saham *outstanding*

BETA = *slope* koefisien dari model pasar

RETURN = *return* yang didapat rata-rata per tahun

MIN_RET = *return* minimal

3) *Asset Growth*

Asset growth adalah kenaikan aset yang dimiliki perusahaan, kenaikan aset dapat membandingkan antara banyaknya aset tahun sebelumnya dengan aset pada tahun yang berjalan. Ketika kenaikan aset yang dimiliki perusahaan rendah maka risiko litigasi yang dimiliki perusahaan rendah dan ketika kenaikan aset perusahaan tinggi maka risiko litigasi yang ditimbulkan tinggi pula. Hal tersebut karena ketika kenaikan aset rendah maka kreditur tidak akan mencurigai perusahaan melakukan tindakan tidak etis sehingga tidak melakukan tuntutan hukum namun ketika kenaikan aset tinggi maka akan menimbulkan kecurigaan bagi pihak kreditur ataupun investor karena kenaikan tersebut dianggap tidak wajar sehingga risiko litigasi yang dimiliki perusahaan akan tinggi pula.

Pengukuran risiko litigasi dalam penelitian ini menggunakan *asset growth* mengacu pada teori Watts (2003) yang menyatakan bahwa pernyataan berlebihan dari aset bersih cenderung menghasilkan biaya litigasi yang lebih besar dibanding pernyataan aset bersih yang lebih rendah. Pertumbuhan aset yang besar mengindikasikan risiko litigasi yang harus dihadapi perusahaan menjadi tinggi. Litigasi cenderung lebih banyak dihasilkan oleh pernyataan yang berlebihan dibandingkan pernyataan yang lebih rendah dari laba dan aset bersih. Biaya litigasi ekspektasian dari pernyataan yang berlebihan lebih tinggi daripada pernyataan yang lebih rendah, maka manajemen dan auditor mempunyai kecenderungan untuk menyatakan lebih rendah pada laba dan aset bersih (Deslatu & Susanto, 2009). Oleh karena itu pertumbuhan aset yang tinggi cenderung meningkatkan risiko litigasi dibandingkan dengan pertumbuhan aset yang rendah.

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Cheng dan Khung (2016) yang meneliti tentang pengaruh kewajiban *corporate social responsibility* terhadap konservatisme akuntansi berhasil menemukan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi.

Yuliarti dan Yanto (2017) yang meneliti pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan profitabilitas terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berhasil menemukan bahwa *leverage* dan ukuran dewan komisaris secara positif signifikan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Brilianti (2013) yang meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *leverage* dan komite audit terhadap konservatisme akuntansi menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan kepemilikan institusional, *leverage* dan komite audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Risdiyani dan Kusmuriyanto (2015) meneliti tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance*, *leverage*, pertumbuhan perusahaan dan *financial distress* terhadap konservatisme akuntansi. Hasil penelitian juga berhasil menemukan bahwa kepemilikan institusional dan *financial distress* berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan *leverage* dan pertumbuhan

perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Sementara itu, kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sementara Purnama dan Daljono (2013) yang meneliti pengaruh ukuran perusahaan, rasio *leverage*, intensitas modal dan likuiditas perusahaan terhadap konservatisme perusahaan yang belum menggunakan IFRS menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan rasio *leverage* dan likuiditas gagal membuktikan pengaruhnya terhadap konservatisme akuntansi.

Penelitian yang membuktikan bagaimana prinsip konservatisme diterapkan dalam praktik akuntansi dan bagaimana pengaruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya sudah cukup banyak dilakukan. Beberapa hasil penelitian lainnya mengenai konservatisme akuntansi dirangkum dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian		Hasil Penelitian
1.	Chia-Ling Cheng dan Fan-Hua Kung (2016)	The Effect of Mandatory Corporate Social Responsibility Disclosure Policy on Accounting Conservatism	Variabel dependen: Konservatisme akuntansi Variabel independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel kontrol: 1. Ukuran perusahaan 2. Rasio <i>leverage</i>	1. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 2. Kepemilikan pemerintah dapat memperlemah pengaruh <i>corporate social responsibility disclosure</i> terhadap konservatisme akuntansi.

			<p>3. Arus kas</p> <p>4. Umur perusahaan</p> <p>5. <i>Return on Asset (ROA)</i></p> <p>Variabel moderating: Kepemilikan pemerintah</p>	
2.	Shella Deslatu dan Yulius Kurnia Susanto (2009)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, <i>Debt Covenant, Litigation, Tax and Political Costs</i> dan Kesempatan Bertumbuh terhadap Konservatisme Akuntansi	<p>Variabel dependen: Konservatisme akuntansi</p> <p>Variabel independen:</p> <p>1. Kepemilikan manajerial</p> <p>2. <i>Debt covenant</i> diprosikan dengan <i>leverage</i></p> <p>3. <i>Litigation</i></p> <p>4. <i>Tax and political costs</i></p> <p>5. Kesempatan Bertumbuh</p>	<p>1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.</p> <p>2. <i>Debt covenant</i> yang diprosikan dengan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.</p> <p>3. <i>Litigation</i> berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.</p> <p>4. <i>Tax and political costs</i> tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi</p> <p>5. Kesempatan bertumbuh tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.</p>
3.	Calvin Oktomegah (2012)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur di BEI	<p>Variabel dependen: Konservatisme akuntansi</p> <p>Variabel independen:</p> <p>1. <i>Leverage</i></p> <p>2. Kepemilikan manajerial</p>	<p>1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.</p> <p>2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.</p>

			3. Ukuran perusahaan	3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
4.	Angga Alfian dan Arifin Sabeni (2013)	Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pemilihan Konservatisme Akuntansi	<p>Variabel dependen: Konservatisme akuntansi</p> <p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio <i>leverage</i> 2. Ukuran perusahaan 3. Intensitas modal 4. Kepemilikan manajerial 5. Kepemilikan public 6. Kesempatan tumbuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 3. Intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 5. Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 6. Kesempatan tumbuh berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
5.	Ni Kd Sri Lestari Dewi dan I Ketut Suryanawa (2013)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, <i>Leverage</i> dan <i>Financial</i>	Variabel dependen: Konservatisme akuntansi	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

		<i>Distress</i> terhadap Konservatisme Akuntansi	Variabel independen: 1. Kepemilikan manajerial 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Financial distress</i>	2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 3. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi
6.	Willyza Purnama H. dan Daljono (2013)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rasio <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, dan Likuiditas Perusahaan terhadap Konservatisme Perusahaan	Variabel dependen: Konservatisme akuntansi Variabel independen: 1. Ukuran perusahaan 2. Rasio <i>leverage</i> 3. Intensitas modal 4. Likuiditas	1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 2. Rasio <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 3. Intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 4. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
7.	Dinny Prastiwi Brilianti (2013)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi Perusahaan	Variabel dependen: Konservatisme akuntansi Variabel independen: 1. Kepemilikan manajerial 2. Kepemilikan institusional 3. <i>Leverage</i> 4. Komite audit	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

				konservatisme akuntansi.
8.	Radyasinta Surya Pratanda dan Kusmuriyanto (2014)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> , Likuiditas, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap Konservatisme Akuntansi	Variabel dependen: Konservatisme akuntansi Variabel independen: 1. Kepemilikan manajerial 2. Kepemilikan institusional 3. Komisaris independen 4. Likuiditas 5. Profitabilitas 6. <i>Leverage</i>	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 3. Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 4. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 5. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 6. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
9.	Ni Wayan Noviantari dan Ni Made Dwi Ratnadi (2015)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> pada Konservatisme Akuntansi	Variabel dependen: Konservatisme akuntansi Variabel independen: 1. <i>Financial distress</i> 2. Ukuran Perusahaan 3. <i>Leverage</i>	1. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 3. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

				konservatisme akuntansi.
10.	Fani Risdiyani dan Kusmuriyanto (2015)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi	<p>Variabel dependen: Konservatisme akuntansi</p> <p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional 2. Kepemilikan manajerial 3. Komisaris independen 4. <i>Leverage</i> 5. Pertumbuhan Perusahaan 6. <i>Financial Distress</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 3. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 4. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 5. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 6. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi.
11.	Mulyani dan Jufenrio (2017)	Konservatisme Akuntansi dan Faktor yang Mempengaruhinya (Suatu Analisis terhadap Biaya Litigasi, <i>Leverage</i> , dan <i>Growth Opportunities</i>)	<p>Variabel dependen: Konservatisme akuntansi</p> <p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya litigasi 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Growth opportunities</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya litigasi berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 3. <i>Growth opportunities</i> tidak berpengaruh

				terhadap konservatisme akuntansi
12.	Sulastiningsih dan Jaza Anil Husna (2017)	Pengaruh <i>Debt Covenant</i> , <i>Bonus Plan</i> , <i>Political Cost</i> dan Risiko Litigasi terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur	Variabel dependen: Konservatisme akuntansi Variabel independen: 1. <i>Debt covenant</i> diproksikan dengan <i>leverage</i> 2. <i>Bonus plan</i> diproksikan dengan kepemilikan manajerial 3. <i>Political cost</i> diproksikan dengan ukuran perusahaan 4. Risiko litigasi	1. <i>Debt covenant</i> yang diproksikan dengan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 2. <i>Bonus plan</i> yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 3. <i>Political cost</i> yang diproksikan dengan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 4. Risiko litigasi berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
13.	Dita Yulianti dan Heri Yanto (2017)	The Effect of Leverage, Firm Size, Managerial Ownership, Size of Board Commissioner s and Profitability to Accounting Conservatism	Variabel dependen: Konservatisme akuntansi Variabel independen: 1. <i>Leverage</i> 2. Ukuran perusahaan 3. Kepemilikan manajerial 4. Ukuran dewan komisaris	1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 4. Ukuran dewan komisaris

				berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 5. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
--	--	--	--	---

Sumber: Berbagai jurnal, 2018

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini peneliti menguji pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai variabel independen yang dapat mempengaruhi konservatisme akuntansi yang penelitiannya masih jarang ditemukan di Indonesia, serta menggunakan risiko litigasi sebagai variabel moderating dan menggunakan populasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

2.4 Kerangka Berpikir

2.4.1 Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Konservatisme Akuntansi

Perusahaan berusaha untuk menggunakan pemenuhan *corporate social responsibility* sebagai alat untuk mengubah pandangan *stakeholder* terhadap perusahaan tersebut, dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan citra yang baik serta menciptakan hubungan yang baik dengan para *stakeholder* yaitu investor, kreditur, pemerintah dan masyarakat khususnya. Selanjutnya, dengan menggunakan pemenuhan *corporate social responsibility*, perusahaan ingin meningkatkan kemampuan negosiasi kontrak dengan pemasok atau lembaga pemerintah, menghasilkan premi untuk produk dan layanan, serta mengurangi biaya

modal, sehingga dengan demikian kinerja keuangan perusahaan menjadi meningkat. Sebaliknya, para pemangku kepentingan dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan dengan citra sosial yang positif melalui konsumsi, investasi dan pekerjaan. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan penjualan atau pengurangan biaya manajemen dan biaya politik (Cheng & Kung, 2016).

Berdasarkan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memenuhi harapan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dan pengakuan dari masyarakat. Legitimasi penting bagi perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pengembangan strategi perusahaan ke depan. Perusahaan dapat memperoleh legitimasi apabila nilai-nilai yang di anut oleh perusahaan selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Ketika terdapat perbedaan antara dua sistem nilai tersebut akan memicu ancaman legitimasi bagi organisasi. Ancaman ini dapat berupa sanksi sosial, hukum, ekonomi dan lainnya (Dowling & Pfeffer, 1975). Oleh karena itu perusahaan mulai memperhitungkan faktor sosial sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial masyarakat untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dan untuk meningkatkan legitimasi baik dari investor, kreditur, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi sosial dan keuangan dalam laporan tahunan perusahaan.

Pengungkapan informasi sosial menjadi sarana bagi perusahaan untuk membangun reputasi perusahaan, mendapatkan perhatian dari masyarakat dan

memperbaiki legitimasi yang diperoleh perusahaan dari *stakeholder*-nya (Lindawati & Puspita, 2015). Pengungkapan ini menunjukkan tingkat kepatuhan suatu perusahaan (Branco & Rodrigues, 2008) terhadap peraturan yang berlaku termasuk dalam pelaporan keuangannya. Pengungkapan *corporate social responsibility* yang baik akan meningkatkan reputasi perusahaan. Pelaku bisnis yang baik akan menjalankan bisnis sesuai dengan etika bisnis yang ada dan akan berusaha melaksanakan CSR. Pun pelaku bisnis yang melakukan CSR dianggap dapat berusaha melaksanakan usahanya sesuai dengan etika bisnis (Arumningtyas, dkk., 2017). Ketika perusahaan memiliki reputasi yang baik dan memperoleh dukungan dari masyarakat serta *stakeholder* lainnya, perusahaan akan melarang manajemen untuk terlibat dengan kegiatan yang bertentangan dengan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya seperti dalam kasus pelaporan laba yang *overstatement* yang mana akan memicu ancaman legitimasi dan keberlangsungan hidup perusahaan. Perusahaan akan lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak kehilangan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, salah satu caranya adalah dengan menerapkan akuntansi yang konservatif karena dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen untuk melaporkan laba yang berlebihan demi kepentingannya sendiri dan dapat menghadapi ketidakpastian laba atau rugi.

Beyer, *et al.* (2010) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi dapat meningkatkan ketepatan informasi dan mengurangi asimetri informasi. Biaya litigasi karena perilaku oportunistik manajemen yang ingin memanipulasi laba juga dapat terhindar dengan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. Sehingga

pengungkapan CSR yang maksimal akan mempengaruhi perusahaan untuk menerapkan konservatisme akuntansi selain untuk mempertahankan legitimasi juga menghindari ancaman litigasi yang dapat merusak kepercayaan para pemangku kepentingan. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Kung (2016) yang berhasil membuktikan bahwa kewajiban CSR mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi secara positif signifikan pada perusahaan BUMN di China.

2.4.2 Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Konservatisme Akuntansi

Tingkat hutang atau *leverage* menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang dan perbandingannya dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Leverage* juga dapat menjadi suatu indikasi bagi pemberi pinjaman untuk tingkat keamanan pengembalian dana yang telah diberikan kepada perusahaan (Alfian & Sabeni, 2013). Dengan kata lain, *leverage* digunakan sebagai pertimbangan para kreditur jika ingin memberikan pinjaman kepada perusahaan, karena dengan rasio *leverage* ini kreditur dapat memperhitungkan risiko pemberian pinjaman terhadap suatu perusahaan (Purnama H & Daljono, 2013).

Teori akuntansi positif dari Watts dan Zimmerman (1990) pada hipotesis hutang atau ekuitas menyatakan bahwa makin tinggi rasio hutang perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Perusahaan yang menggunakan metode akuntansi yang dapat menaikkan laba akan menimbulkan *overstatement* dalam laporan keuangannya, sehingga banyak kreditur yang lebih mengharapkan penggunaan konsep konservatisme dalam pembuatan laporan keuangan (Padmawati &

Fachrurrozie, 2015). Hal ini dikarenakan ketika perusahaan melaporkan laba atau aset yang *overstatement*, kreditur tidak dapat melihat kemampuan membayar hutang yang sebenarnya. Oleh karena itu kreditur akan menuntut penerapan konservatisme akuntansi yang mana lebih cepat mengakui *bad news* pada perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi (Ahmed, *et al.*, 2000).

Semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menerapkan konservatisme akuntansi. Hal tersebut menurut Guay dan Verrecchia (2007) karena pemberi pinjaman berkepentingan atas keamanan dananya, sehingga akan berupaya melindungi dirinya dari tindakan manajemen yang kurang menguntungkan. Konservatisme ini dapat membatasi perilaku oportunistik manajer dalam melebihkan jumlah laba periode sekarang. Selain itu juga untuk menghindari kecurigaan dan memperoleh kepercayaan dari pihak eksternal. Penerapan metode akuntansi yang konservatif juga dapat memungkinkan kreditur untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang sebenarnya karena perusahaan mengakui *bad news* (beban atau rugi) dengan segera daripada mengakui *goodnews* (laba atau pendapatan).

Yuliarti dan Yanto (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit, sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba sekarang lebih tinggi yang dapat dilakukan dengan cara mengurangi biaya-biaya yang ada. Kreditur sebagai peminjam dilindungi oleh perjanjian hutang yang mana dapat melindunginya dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan atau membiarkan model kerja

dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya menurunkan keamanan (atau menaikkan risiko) bagi kreditur (Wulandari, 2014). Untuk menghindari risiko tersebut, pemberi pinjaman menuntut perusahaan untuk menerapkan akuntansi yang konservatif yang mana tidak cepat mengakui pendapatan melainkan segera mengakui adanya beban.

Pada perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang relatif tinggi, kreditur memiliki hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan operasi dan akuntansi perusahaan sehingga manajer akan kesulitan untuk menyembunyikan informasi dari kreditur. Hak lebih besar yang dimiliki kreditur akan mengurangi asimetri informasi di antara kreditur dan manajemen. Kreditur berkepentingan terhadap distribusi aktiva bersih dan laba yang lebih rendah kepada manajer dan pemegang saham sehingga kreditur cenderung meminta manajer untuk menyelenggarakan akuntansi konservatif. Selain kreditur, mekanisme *corporate governance* juga ikut berperan dalam mengawasi penggunaan dana dari kreditur oleh pihak manajemen perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat hutang atau *leverage* yang dimiliki perusahaan, maka permintaan akan penerapan akuntansi yang konservatif semakin tinggi pula karena kreditur berkepentingan terhadap keamanan dananya yang dapat menguntungkan bagi dirinya. Penelitian yang dilakukan Yuliarti dan Yanto (2017) dan Herita dan Zulaikha (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi.

2.4.3 Risiko Litigasi Memoderasi Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Konservatisme Akuntansi

Fombrun dan Shanley (1990) dalam Cheng dan Khung (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial akan meningkatkan dan mempertahankan reputasi perusahaan. Perusahaan yang telah memiliki reputasi yang baik cenderung melarang manajemen untuk terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan harapan *stakeholder*-nya. Informasi keuangan merupakan salah satu hal yang harus diungkapkan oleh perusahaan, selain pengungkapan sosial dan lingkungan. Pengungkapan aktivitas perusahaan yang maksimal akan menghambat perilaku moral yang cenderung memanipulasi laba untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder*, dengan secara sukarela menyediakan informasi keuangan yang transparan dan dapat diandalkan serta laporan keuangan yang berkualitas (Cheng & Kung, 2016). Menyediakan informasi keuangan yang transparan dan dapat diandalkan dianggap sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (Salewski & Zulch, 2013) salah satunya adalah dengan cara menyajikan laporan keuangan yang konservatif.

Perusahaan yang melaksanakan kewajiban CSRnya, akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berhubungan baik dengan masyarakat dan mengubah budaya perusahaan serta menumbuhkan perilaku moral manajemen yang baik untuk senantiasa memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Teori *stakeholder* membawa pandangan bahwa perusahaan menginvestasikan sumber daya untuk memenuhi harapan *stakeholder* dalam rangka untuk memperoleh dukungan mereka atau untuk menghindari menarik perhatian yang tidak diinginkan dari kelompok-kelompok

eksternal (Cheng & Kung, 2016). Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan (Gozhali & Chariri, 2014:439) sehingga kegiatan perusahaan disesuaikan dengan harapan *stakeholder* untuk mendapatkan dukungan itu. Menyediakan laporan keuangan yang konservatif adalah salah satu cara perusahaan menunjukkan tanggung jawabnya terhadap *stakeholder*.

Terkait dengan pengaruh pengungkapan CSR terhadap konservatisme akuntansi, ada hal lain yang mempengaruhi yaitu risiko litigasi. Risiko litigasi diartikan sebagai risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan (Juanda, 2009). Watts (2003) menyatakan bahwa penerapan konservatisme akuntansi mengurangi adanya potensi tuntutan hukum atau litigasi. Dengan adanya risiko tuntutan hukum (litigasi) akan mendorong perkembangan konservatisme karena tuntutan hukum banyak muncul saat laba dan aktiva dicatat terlalu tinggi. Karena adanya potensi tuntutan hukum akibat pencatatan yang *overstatement* daripada yang *understatement*, manajemen dan auditor terdorong untuk melaporkan laba dan aktiva yang konservatif (Sari, 2004). Ketika perusahaan telah memenuhi harapan *stakeholder*, perusahaan akan terhindar dari ancaman litigasi.

Litigasi adalah ancaman yang ditakuti oleh perusahaan karena hal tersebut dapat merusak reputasi dan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Pengungkapan CSR adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh dukungan dari *stakeholder* dan meningkatkan reputasi. Perusahaan yang telah

memiliki reputasi yang baik akan menghindari kegiatan yang akan merusak kepercayaan *stakeholder* yang mana akan memicu litigasi dan cenderung patuh pada peraturan yang berlaku termasuk dalam pelaporan akuntansi. Perusahaan yang mengungkapkan CSRnya dengan maksimal akan lebih konservatif dalam pernyataan laba dan aset bersih. Oleh karena itu perusahaan yang mengungkapkan CSR sesuai dengan undang-undang akan cenderung lebih konservatif terlebih jika ditambah dengan adanya kemungkinan ancaman litigasi.

2.4.4 Risiko Litigasi Memoderasi Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Konservatisme Akuntansi

Leverage menunjukkan seberapa besar aktivitas atau aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Penelitian mengenai tingkat hutang yang diprosikan dengan *leverage* terhadap penerapan konservatisme akuntansi menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Noviantari dan Ratnadi (2015) serta Oktomegah (2012) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme. Sedangkan Risdiyani dan Kusmuriyanto (2015), Yuliarti dan Yanto (2017) serta Mulyani dan Jufenrio (2017) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sementara Purnama dan Daljono (2013) dan Brilianti (2013) gagal membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka dalam penelitian ini memasukkan risiko litigasi sebagai pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi, sehingga menghasilkan pengaruh yang lebih jelas.

Risiko litigasi merupakan risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman hukum atau litigasi dari *stakeholder* yang merasa dirugikan oleh perusahaan atau hak-hak *stakeholder* yang tidak terpenuhi oleh perusahaan. Risiko litigasi dapat timbul dari pihak kreditur maupun investor. Risiko litigasi yang berasal dari kreditur disebabkan oleh risiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutangnya (Suryandari & Priyanto, 2012). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan hendaknya tidak hanya terfokus untuk memakmurkan pemegang saham saja, tetapi juga pihak lain yang memiliki hak yang sama untuk menerima manfaat dari keberadaan perusahaan itu sendiri (Lin & Amin, 2016). Pihak lain ini salah satunya adalah kreditur sebagai pemberi pinjaman perusahaan. Ketika perusahaan mengalami ancaman litigasi dari kreditur, berarti ada hal-hal yang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang merupakan hak dari kreditur, seperti pembayaran hutang atau pembayaran beban bunga yang berasal dari hutang.

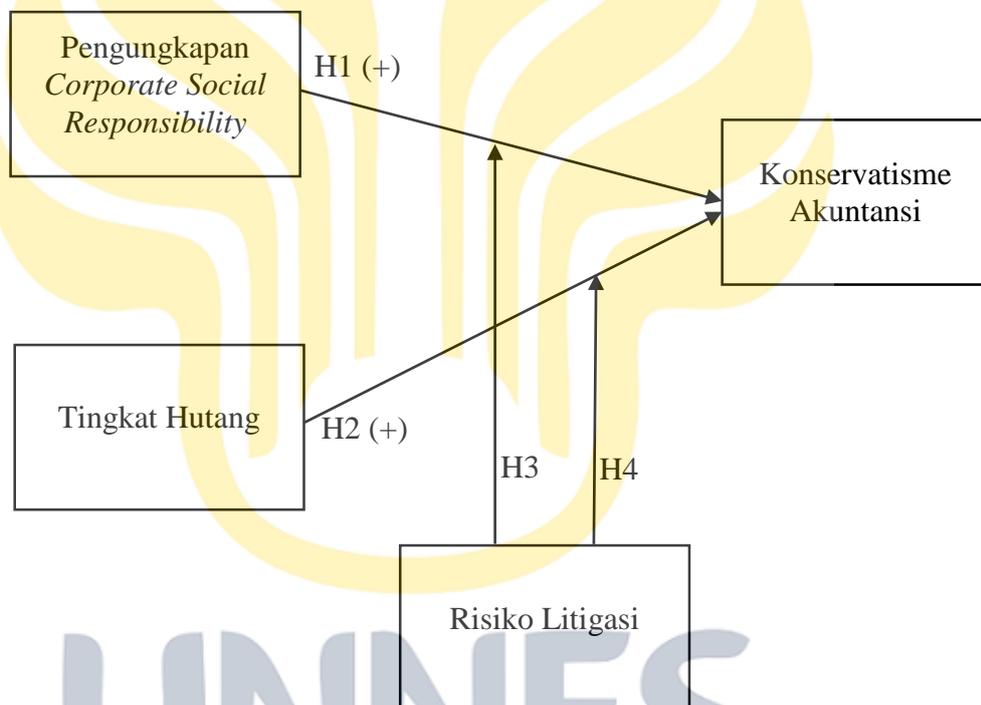
Watts dan Zimmerman (1990) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka semakin dekat perusahaan pada batas yang dipersyaratkan dalam kontrak hutang. Semakin dekat batas yang dipersyaratkan dalam kontrak hutang maka semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran kontrak hutang. Dalam situasi ini ada kemungkinan bahwa manajer akan memilih metode akuntansi yang lebih optimis yakni menaikkan laba agar perusahaan dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran kontrak dan menghindari perusahaan dari biaya renegotiasi kontrak. Disisi lain, kreditur menuntut penerapan akuntansi yang konservatif agar perusahaan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan kreditur. Guay dan Verrechia (2007) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki

tingkat hutang yang tinggi memiliki kecenderungan untuk konservatif karena pemberi pinjaman berkepentingan atas keamanan dananya, sehingga mereka akan berupaya untuk melindungi dirinya dari tindakan manajemen yang kurang menguntungkan. Hal tersebut juga dapat disebabkan karena kreditur sebagai *stakeholder* tidak ingin adanya kelebihan pembayaran untuk pemegang saham yang akan mengakibatkan semakin berkurangnya bagian untuk kreditur. Kreditur berkepentingan untuk memastikan bahwa hutang mereka dapat dilunasi pada saat jatuh tempo. Untuk itu kreditur menginginkan agar aktiva perusahaan mencukupi pada saat hutang jatuh tempo. Dan salah satu penyebab yang dapat mengurangi jumlah aktiva perusahaan adalah pembayaran dividen yang terlalu tinggi kepada pemegang saham (*shareholder*) (Sari, 2004).

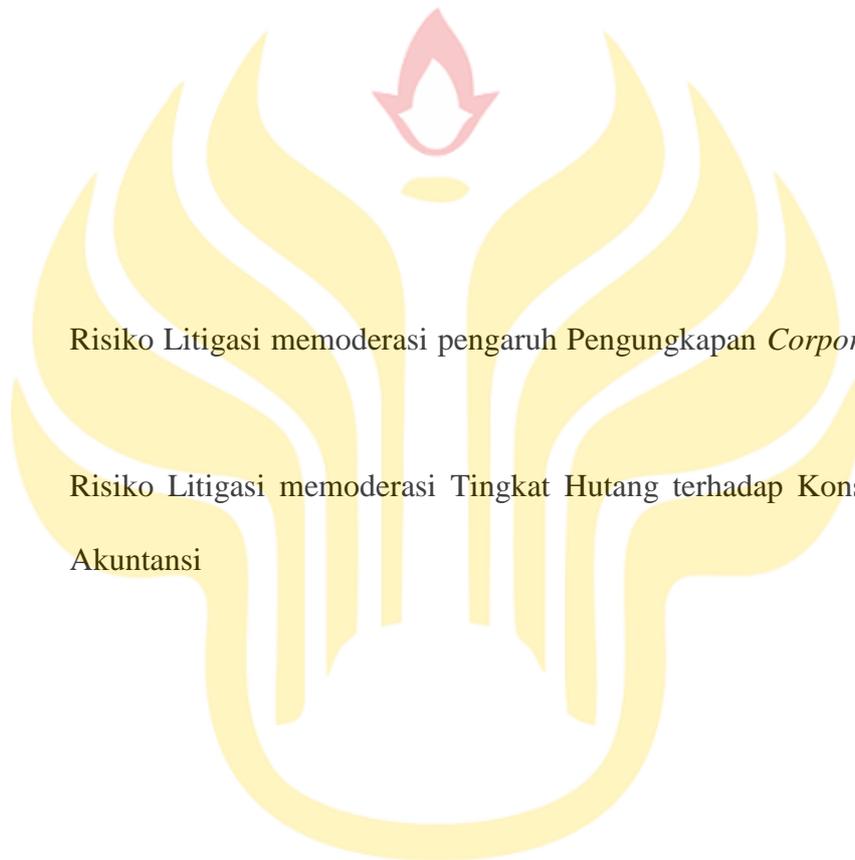
Konservatisme akuntansi dapat membatasi manajemen untuk melaporkan laba atau aktiva secara berlebihan (*overstatement*) yang mana hal tersebut dapat membahayakan kreditur. Kreditur tidak dapat melihat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang sebenarnya jika laba atau aktiva dilaporkan secara *overstatement*. Jika kenyataannya perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya maka kreditur akan dirugikan. Disamping itu pelaporan laba atau aktiva yang *overstatement* dapat memicu timbulnya risiko litigasi. Ketika litigasi terjadi maka akan merugikan perusahaan yaitu hilangnya kepercayaan *stakeholder*. Selain itu tuntutan hukum yang dialami perusahaan akan merusak citra dan reputasi perusahaan sehingga akan berimbas pada harga saham. Risiko litigasi juga mengakibatkan perusahaan mengeluarkan biaya yang banyak untuk menyelesaikan tuntutan hukum. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki tingkat

hutang yang relatif tinggi yang mana juga memunculkan risiko litigasi akan menerapkan metode akuntansi yang lebih konservatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR dan tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi dengan risiko litigasi sebagai variabel moderating. Kerangka berpikir dapat ditunjukkan dari gambar 3.1 dibawah ini.



Gambar 3. 1 Model Penelitian



Risiko Litigasi memoderasi pengaruh Pengungkapan *Corporate Social*

Risiko Litigasi memoderasi Tingkat Hutang terhadap Konservatisme

Akuntansi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
2. Tingkat hutang berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
3. Risiko litigasi memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap konservatisme akuntansi.
4. Risiko litigasi memoderasi pengaruh tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Untuk perusahaan
 - a. Perusahaan pertambangan diharapkan dapat lebih konservatif agar dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemakainya.
 - b. Perusahaan khususnya sektor pertambangan untuk dapat meningkatkan kegiatan CSR-nya. Dengan begitu akan meningkatkan motivasi manajer

untuk menyediakan laporan keuangan yang berkualitas melalui penerapan konservatisme akuntansi.

2. Untuk peneliti selanjutnya
 - a. Menggunakan *market to book ratio* untuk mengukur konservatisme akuntansi yang mencerminkan nilai pasar dibandingkan dengan nilai buku perusahaan.
 - b. Penggunaan teori lain untuk memandang pengaruh pengungkapan CSR terhadap konservatisme akuntansi.
 - c. Menggunakan sampel perusahaan selain perusahaan pertambangan yaitu perusahaan manufaktur sektor industri dasar kimia yang juga memiliki kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, C. A., & McNicholas, P. (2007). "Making a Difference: Sustainability Reporting, Accountability and Organizational Change". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 20(3), 382-402
- Ahmed, A. S., Morton, R. M., & Schaefer, T. F. (2000). Accounting Conservatism and The Valuation of Accounting Numbers: Evidence of The Feltham-Ohlson (1996) Model. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 15(3), 271-292
- Alfian, A., & Sabeni, A. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan Konservatisme Akuntansi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1-10. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Arumningtyas, S., Tyesta A. L. W., L., & Asy'ari, H. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-12. Retrieved from <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0ATINJAUAN>
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2000. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2007. *Accounting Theory. 5th Edition. Buku 2. Edisi Terjemahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Basu, S. (1997). The Conservatism Principle and The Asymmetric Timelines of Earnings. *Journal of Accounting & Economics*, 24, 3-37
- Beyer, A., Cohen, D., Lys, T. & Walther, B. (2010). The Financial Reporting Environment: Review of The Recent Literature. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 296-343.
- Brilianti, D.P. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi Perusahaan. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 268-275. <https://doi.org/10.15294/AAJ.V2I3.2500>
- Branco, M. C., & Rodrigues, L. L. (2008). Factors Influencing Social Responsibility Disclosure by Portuguese Companies. *Journal of Business Ethics*, 83, 685-701.
- Cahyonowati, N., & Darsono. (2013). Trend and Determinants of Csr Disclosure in Indonesia : A Response of The Act No. 40 (2007). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1), 67-78. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda>
- Cheng, C.-L., & Kung, F.-H. (2016). The Effects of Mandatory Corporate Social Responsibility Policy on Accounting Conservatism. *Review of Accounting and Finance*, 15(1), 2-20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/RAF-12-2014-0135>
- Chung, H. H., Wynn, J. P., & Yi, H. (2013). Litigation risk, accounting quality, and

- investment efficiency. *Advances in Accounting*, 29(2), 180–185. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2013.09.009>
- Deegan, C. (2002). The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures-A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282-311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Deslatu, S., & Susanto, Y. K. (2009). Pengaruh Kepemilikan Managerial, Debt Covenant, Litigation, Tax and Political Cost dan Kesempatan Bertumbuh terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Ekuitas*, 14(110), 137-151.
- Dewi, N. K. S. L., & Suryanawa, I. K. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Leverage, dan Financial Distress Terhadap Konservatisme Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 223-234
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- E, M. B., & Clarkson. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *The Academy of Management Review*, 20(1), 92-117. <https://doi.org/10.2307/256064>
- Fombrun, C. J., Gardgerb, N. A., & Barnett, M. L. (2000). Opportunity Platforms and Safety Nets: Corporate Citizenship and Reputational Risk. *Business and Society Review*, 105(1) 85-106
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam & Chariri, Anis. 2014. *Teori Akuntansi: International Financial Reporting System (IFRS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Givoly, D., & Hayn, C. (2000). The Changing Time-Series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative? *Journal of Accounting & Economics*, 29,287-320
- Grahoar, M. (2011). The Use of Corporate Responsibility Reports- For Managing Legitimacy. *Goteborg School of Business, Economics and Law*. Retrieved from https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30504/1/gupea_2077_30504_1
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate Social and Environmental Reporting, A Review of The Literature and A Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47-77. <https://doi.org/10.1108/09513579510146996>
- Guay, W., & Verrecchia, R. E. (2007). Conservative disclosure. *SSRN 995562*, (November 2017), 1–45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.995562>
- Habib, A., Jiang, H., Bhuiyan, M. B. U., & Islam, A. (2014). Litigation risk, financial reporting and auditing: A survey of the literature. *Research in Accounting Regulation*, 26(2), 145–163.

<https://doi.org/10.1016/j.racreg.2014.09.005>

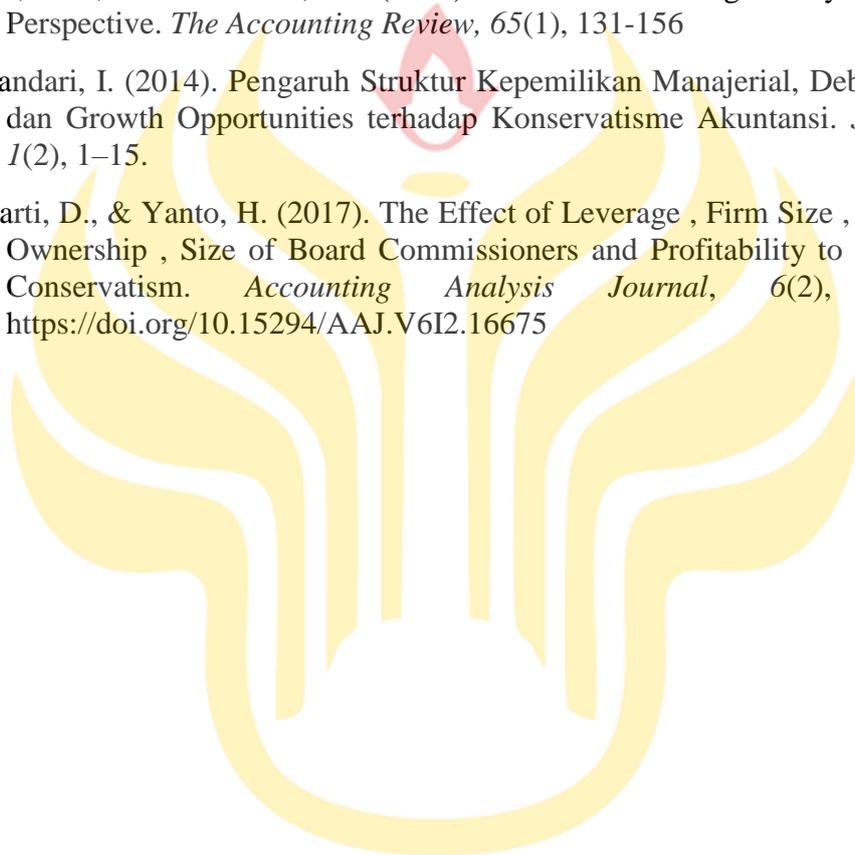
- Hadi, N. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Haniati, S., & Fitriany. (2010). Pengaruh Konservatisme Terhadap Asimetri Informasi Dengan Menggunakan Beberapa Model Pengukuran Konservatisme. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, 1–28.
- Hansen, J. C., Hong, K. P., & Park, S. H. (2018). Accounting conservatism: A life cycle perspective. *Advances in Accounting*, 40(January), 76–88. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2017.10.001>
- Harahap, Sofyan Safri. 2012. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers. hal: 90-91
- Hertina, N. R., & Zulaikha. (2017). Analisis Penerapan Konservatisme Akuntansi di Indonesia dalam Perspektif Positive Accounting Theory. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–10. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- <https://bisnis.tempo.co/read/225895/icw-ungkap-manipulasi-penjualan-batu-bara-grup-bakrie>, diakses pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 8.17
- <https://bisnis.tempo.co/read/33339/bapepam-kasus-kimia-farma-merupakan-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 8.20
- <https://bisnis.tempo.co/read/81332/laporan-keuangan-kereta-api-diduga-salah>, diakses pada tanggal 11 September 2018 pukul 12.15
- <https://www.bareksa.com/id/text/2015/02/25/bei-laporan-keuangan-inovisi-salah-saji-suspen-saham-belum-akan-dibuka/9562/analysis>, diakses pada tanggal 11 September 2018 pukul 12.30
- Juanda, A. (2009). Risiko Litigasi Pada Perusahaan Go Publik Di Indonesia. *Humanity Journal*, 5(1), 1–11.
- Jupe, Robert. (2005). Disclosure in Corporate Environmental Report: A Test of Legitimacy Theory. *Working Paper*, 91
- LaFond, R., & Watts, R. L. (2008). The information role of conservatism. *Accounting Review*, 83(2), 447–478. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.2.447>
- Lasdi, L. (2009). Pengujian Determinan Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 1(1), 1-20
- Lin, H. -Y., & Amin, N. (2016). The Relationship Between Corporate Social Performance and Financial Performance: Evidence from Indonesia and Taiwan. *European Journal of Business and Social Science*, 5(3), 50-62. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8616.2008.00521.x>
- Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja

- Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 157–174. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013>
- Marnelly, T. R. (2012). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 3(1), 49–59
- Mulyani, & Jufenrio. (2017). Konservatisme Akuntansi & Faktor yang Mempengaruhi (Suatu Analisis terhadap Biaya Litigasi, Leverage, dan Growth Opportunities). *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(2), 1-16
- Noviantari, N. W., & Ratnadi, N. M. D. (2015). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Leverage pada Konservatisme Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3(11), 646-660
- O'Donovan, G. (2002). Environmental Disclosures in The Annual Report: Extending The Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 344-371. <https://doi.org/10.1108/09513570210435870>
- Oktomegah, C. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 36-42
- Padmawati, I. R., & Fachrurrozie. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1–11. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Pratanda, R. S., & Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Likuiditas, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 255-263. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Pratiwi, R. D. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(1), 85–97
- Purnama H, W., & Daljono. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rasio Leverage, Intensitas Modal, dan Likuiditas Perusahaan Terhadap Konservatisme Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1-11. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Reskino, & Vemiliyarni, R. (2014). Pengaruh Konvergendi IFRS, Bonus Plan, Debt Covenant, dan Political Cost terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Akuntabilitas*, 7(3), 185–195.
- Rindawati, M. W., & Asyik, N. F. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(6), 2-15
- Risdiyani, F., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi

- Penerapan Konservatisme Akuntansi. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1–10. <https://doi.org/10.15294/AAJ.V4I3.8305>
- Ruch, G. W., & Taylor, G. (2015). Accounting conservatism: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 34, 17–38. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2015.02.001>
- Rustiarini, N. W. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1-24
- Salewski, M. and Zulch, H. (2013). The Association Between Corporate Social Responsibility (CSR) and Earnings Quality: Evidence from European Blue Chips. *HHL Working Paper Series*, 112
- Sari, D. (2004). Hubungan antara Konservatisme Akuntansi dengan Konflik Bondholders-Shareholders Seputar Kebijakan Dividen dan Peringkat Obligasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 63–88.
- Savitri, E. (2016). *Konservatisme Akuntansi. Cara Pengukuran, Tinjauan Empiris dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Yogyakarta: Pustaka Sahila Yogyakarta
- Sefriani, & Wartini, S. (2017). Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 1–28. Retrieved from <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM>
- Sriayu, G. A. P. W., & Mimba, N. P. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(5), 326-344
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito
- Sulastiningsih, & Husna, J. A. (2017). Pengaruh Debt Covenant, Bonus Plan, Political Costs dan Risiko Litigasi terhadap Penerapan Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Kajian Bisnis*, 25(1), 110–125.
- Suryandari, E., & Priyanto, R. E. (2012). Pengaruh Risiko Litigasi dan Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan terhadap Hubungan antara Konflik Kepentingan dan Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(2), 161–174.
- Suwardjono. 2017. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LN.2007/No.106
- Wahyudin, Agus. 2015. *Metodologi Penelitian*. Semarang: Unnes Press
- Wardhani, R. (2008). Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan

Hubungannya dengan Karakteristik Dewan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance. *Symposium Nasional Akuntansi IX*.

- Watts, R. (2003). Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications. *Accounting Horizons*, 17(4), 287–301. <https://doi.org/10.2308/acch.2003.17.4.287>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131-156
- Wulandari, I. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Debt Covenant dan Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jom Fekon*, 1(2), 1–15.
- Yuliarti, D., & Yanto, H. (2017). The Effect of Leverage , Firm Size , Managerial Ownership , Size of Board Commissioners and Profitability to Accounting Conservatism. *Accounting Analysis Journal*, 6(2), 173–184. <https://doi.org/10.15294/AAJ.V6I2.16675>



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG